

**PENANGGULANGAN PENGANGGURAN MELALUI  
PROGRAM KARTU PRAKERJA PADA DINAS TENAGA  
KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:  
INDAH TARINA RIZKI NUZUL FITRI  
NIM. 180802027**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2022 M / 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Tarina Rizki Nuzul Fitri  
NIM : 180802027  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Januari 2000  
Alamat : Lamglumpang, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 November 2022

Yang menyatakan,



**INDAH TARINA RIZKI NUZUL FITRI**  
**NIM.180802027**

**PENANGGULANGAN PENGANGGURAN MELALUI PROGRAM  
KARTU PRAKERJA PADA DINAS TENAGA KERJA  
DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**INDAH TARINA RIZKI NUZUL FITRI**  
**NIM. 180802027**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**A R - R A N I R Y**

Disetujui untuk Diseminarkan oleh:

Pembimbing 1



Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.  
NIP. 198401272011011008

Pembimbing 2



Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc.  
NIDN. 2007017903

**PENANGGULANGAN PENGANGGURAN MELALUI  
PROGRAM KARTU PRAKERJA PADA DINAS TENAGA  
KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH**  
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 10 November 2022 M  
1444 H


Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.  
NIP. 198401272011011008

  
Renaldi Safriansyah, S.E., M.FiSc.  
NIDN. 2007017903

Penguji I

Penguji II

  
Cut Zamharira, S.IP., M.AP.  
NIDN. 2017117904

  
Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.  
NIP. 199011192022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Pada awal tahun 2020, Penyebaran Covid-19 yang semakin cepat meluas dan merata sehingga menjadi *polemic* global saat ini membuat pertumbuhan ekonomi global menurun termasuk di Indonesia, sehingga pengangguran meningkat selama *pandemic*. Pengangguran yang tinggi memiliki dampak buruk bagi kesejahteraan sosial yang mengakibatkan angka kemiskinan melonjak tinggi. Sehingga pemerintah membuat suatu upaya untuk mengurangi angka pengangguran melalui Program Kartu Prakerja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penanggulangan pengangguran melalui Program Kartu Prakerja dan apa saja peluang dan tantangan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penanggulangan pengangguran melalui program kartu prakerja ada dua yaitu pelatihan dan insentif. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan kompetensi diri untuk para pengangguran yang mengikuti program kartu prakerja. sedangkan insentif yaitu tambahan manfaat bagi penerima kartu prakerja dalam bentuk uang. Dalam pelaksanaan program kartu prakerja perlu adanya sosialisasi dan fasilitas. sosialisasi yang dilakukan dengan media sosial melalui website dan televisi Aceh sedangkan fasilitas pendaftaran belum diberikan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Kartu Prakerja mampu mengatasi angka pengangguran di Aceh dari tahun 2021 sebanyak 160.562 jiwa dan turun pada tahun 2022 menjadi 150.176 jiwa. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh belum memberikan dukungan penuh sesuai kebijakan Program Kartu Prakerja.

Kata Kunci: *Penanggulangan, Pengangguran, Program Kartu Prakerja.*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penanggulangan Pengangguran melalui Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung hingga terselesainya skripsi ini saya ucapkan terimakasih atas segala dukungan, arahan, bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak terkait sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik apabila tidak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam penulisan skripsi ini banyak berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil untuk kelancaran skripsi ini. Sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan di UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan serta motivasi.
5. Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si. Selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc. Selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan.
8. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
9. Kedua Orang Tua yang sangat peneliti cintai dan sayangi, Ayahanda Buchari dan ibunda Meutia yang tanpa henti memberikan doa dan dukungan materil serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas seluruh cinta dan kasih sayang yang ayahanda dan ibunda berikan kepada peneliti.
10. Saudara kandung peneliti yang selalu menguatkan dan mengingatkan untuk menyelesaikan tugas penting mahasiswa yaitu skripsi, terima kasih atas kasih sayangnya setiap hari.
11. Sahabat seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara Nobila Saumy Arghniya dan Vina Anjely yang sudah berjuang dari awal kuliah hingga mendapatkan gelar S.AP., terima kasih telah menjadi sahabat suka dan duka dengan dunia perkuliahan.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan baik pada teknik penyusunan maupun isi dari materi yang disajikan. Hal tersebut disebabkan tidak lain oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran, kritik dan nasihat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan peneliti selanjutnya.

Banda Aceh, 10 November 2022  
Yang Menyatakan

**INDAH TARINA RIZKI NUZUL FITRI**  
**NIM.180802027**

## DAFTAR ISI

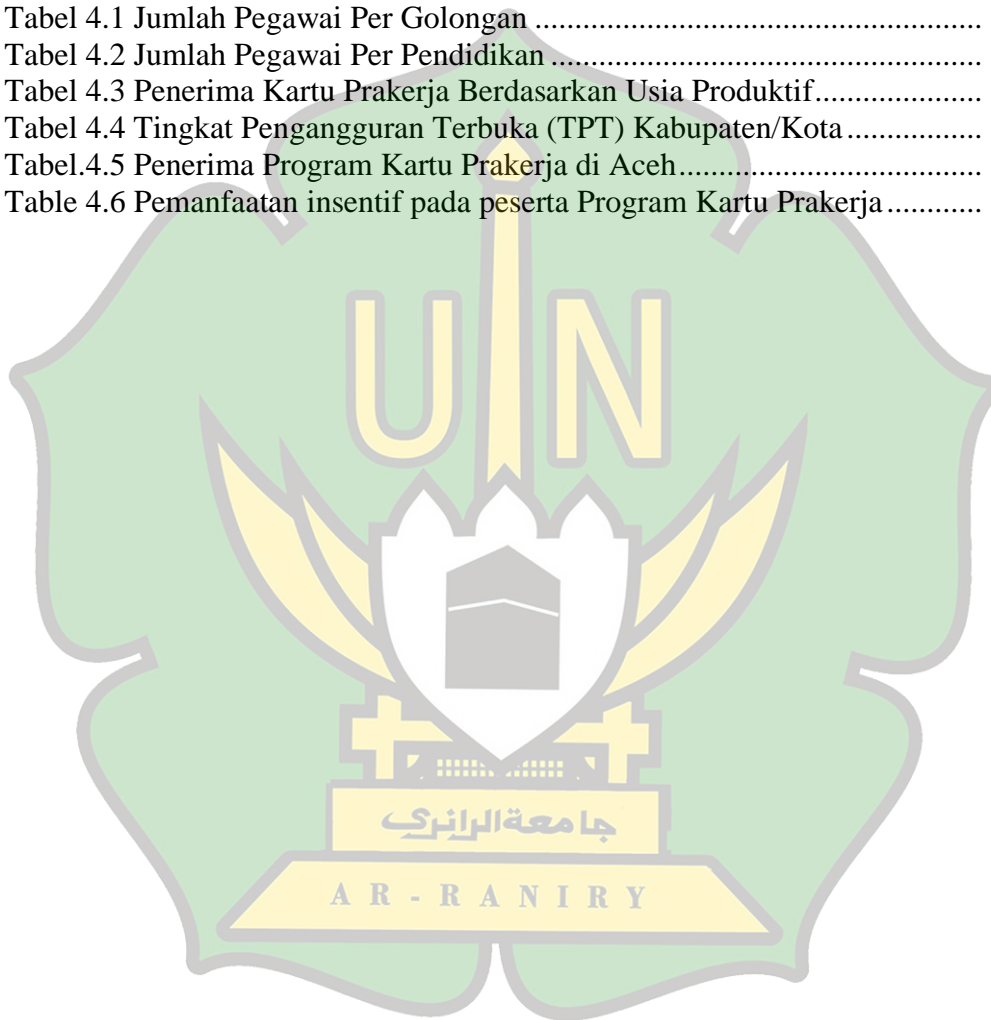
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Manfaat Penelitian .....	8
1.6 Penjelasan Istilah.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Teori Kebijakan Publik .....	13
2.3 Penanggulangan Pengangguran .....	16
2.2.1 Pengertian Pengangguran .....	17
2.2.2 Jenis-Jenis Pengangguran .....	18
2.2.3 Menanggulangi Pengangguran Terhadap Kemiskinan .....	19
2.4 Konsep Ketenagakerjaan.....	20
2.3.1 Pengertian ketenagakerjaan .....	21
2.3.2 Jenis-jenis Tenaga kerja.....	22
2.5 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia.....	24
2.4.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia .....	24
2.4.2 Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	25
2.4.3 Produktivitas Kerja .....	26
2.6 Kerangka Pemikiran.....	27



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	28
3.2 Fokus Penelitian .....	29
3.3 Lokasi Penelitian .....	31
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	32
3.5 Informan Penelitian .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Lembaga /Lokasi Penelitian .....	42
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh .....	42
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh .....	44
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh .....	44
4.1.4 Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh .....	45
4.1.5 Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja .....	46
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	48
4.2.1 Bentuk Penanggulangan Pengangguran melalui Program Kartu Prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh .....	49
4.2.2 Peluang dan Tantangan dalam Pelaksanaan Program Kartu Prakerja .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengangguran di Provinsi Aceh, Februari .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Penanggulangan Pengangguran .....	30
Table 3.2 Dimensi dan Indikator Pelaksanaan Program Kartu Prakerja.....	31
Table 3.3 Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Per Golongan .....	43
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Per Pendidikan .....	43
Tabel 4.3 Penerima Kartu Prakerja Berdasarkan Usia Produktif.....	48
Tabel 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota.....	51
Tabel.4.5 Penerima Program Kartu Prakerja di Aceh.....	53
Table 4.6 Pemanfaatan insentif pada peserta Program Kartu Prakerja.....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh .....	45
Gambar 4.2 TPT se-Pulau Sumatera, Agustus 2021 .....	50
Gambar 4.3 Lima bidang pelatihan diminati di Provinsi Aceh.....	54
Gambar 4.4 Program Kartu Prakerja tepat sasaran .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Wawancara Penelitian.....	77
Lampiran 2. Surat Keterangan Skripsi.....	80
Lampiran 3. Penelitian Ilmiah Mahasiswa.....	81
Lampiran 4. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.....	82
Lampiran 5. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang .....	83
Lampiran 6. Dokumentasi.....	84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, Penyebaran covid-19 yang semakin cepat meluas dan merata sehingga menjadi *polemic* global saat ini membuat pertumbuhan ekonomi global menurun termasuk di Indonesia, sehingga pengangguran meningkat selama *pandemic*. Organisasi Kesehatan dunia (*world health organization*) menetapkan status gawat darurat global untuk wabah virus corona ini. Pandemi ini tidak hanya menyerang Kesehatan tetapi juga menyebabkan krisis ekonomi di setiap negara, di Indonesia sendiri tingkat pengangguran semakin meningkat dikarenakan banyak pekerja atau karyawan yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan atau tempat kerja mereka bekerja.<sup>1</sup>

Pengangguran yang tinggi memiliki dampak yang buruk untuk kesejahteraan sosial yaitu terjadi kemiskinan melonjak tinggi hingga terjadi kejahatan dan masalah sosial lainnya. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan Indonesia memiliki beberapa indikator untuk kesejahteraan yang dinamakan Indikator Kesejahteraan Rakyat Nasional (IKR Nasional), yang terdiri dari: kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.<sup>2</sup> Untuk mencapai keempat indikator kesejahteraan tersebut, pemerintah membutuhkan kerjasama dan tanggung jawab dari berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah baik pusat maupun daerah, melakukan berbagai upaya dalam

---

<sup>1</sup> M.Rasya Dan Khairina Tambunan, "Dampak Covid-19 Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia". *Journal Of Management, Accounting, Economic and Business*. Vol.02 No.04,2021.

<sup>2</sup> Sonny Harry B. Harmadi, *Ekonomi Public*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka), hal. 8. 18.



mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satunya program itu adalah Program Kartu Prakerja.

**Tabel 1.1**  
**Pengangguran di Provinsi Aceh**

No	Tahun	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	Indeks Pengangguran (%)
1	2019	136.076 Jiwa	5,53%
2	2020	136.064 Jiwa	5,42%
3	2021	160.562 Jiwa	6,30%
4	2022	150.176 Jiwa	5,97%

*Sumber: olahan peneliti dari BPS Aceh*

Pengangguran di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebanyak 150.176 jiwa, turun sekitar 10 ribu jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan naik sebanyak 13 ribu jiwa dibandingkan tahun 2020. Penurunan jumlah pengangguran tersebut menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang meningkat dapat diserap dengan baik oleh pasar tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan penduduk yang bekerja, sebaliknya jumlah penduduk yang menganggur menurun.<sup>3</sup> Apabila dilihat berdasarkan tahun 2021 sebanyak 160.562 jiwa atau 6,30% indeks pengangguran bahwasanya pengangguran di Aceh pada tahun ini meningkat sehingga pemerintah berupaya menuruni angka pengangguran tersebut.

Pengangguran di Aceh setiap harinya meningkat Pemerintah Aceh berusaha untuk penanggulangan angka pengangguran yakni meningkatkan ketenagakerjaan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan<sup>4</sup>, pengangguran semakin melunjuk tinggi meemperlambat pembangunan, sosial,ekonomi dan sosial. Tujuan adanya ketenagakerjaan untuk meningkatkan

<sup>3</sup> BPS Provinsi Aceh, *Indikator Tenaga Kerja Provinsi Aceh Februari 2022*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2021) hal. 12.

<sup>4</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan.

keahlian secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan produktivitas dalam menanggulangi pengangguran yang ada di Aceh.

Dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan jelas pemerintah mengatur soal tenaga kerja Indonesia. Dimulai dari penempatan, pelatihan, serta perlindungan. Dengan demikian resmi hukumnya bahwa tenaga kerja dan angkatan kerja merupakan tanggungjawab pemerintah, dimana mereka berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga penghidupan yang layak.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, beliau mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sesuai dengan kampanyenya untuk mencalonkan diri menjadi Presiden periode kedua. Dalam Perpres tersebut disebutkan dalam pasal 1 ayat 1: “Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.”<sup>5</sup> Bahwa dapat diperjelaskan program kartu prakerja dengan menimbang dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan kompetensi yang difasilitasi dengan adanya program kartu prakerja. Saat ini, program kartu prakerja telah memiliki website khusus yaitu [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id).<sup>6</sup>

Tahapan pendaftaran program kartu prakerja dengan membuat akun melalui laman [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id), memasukkan biodata, mengunggah KTP dan foto selfie.

---

<sup>5</sup> PERPRES Nomor 36 Tahun 2020, Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

<sup>6</sup> Kartu Prakerja diakses <https://www.prakerja.go.id/> pada tanggal 16 Mei 2022

Selanjutnya pendaftar mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online sebanyak 18 soal dalam waktu 15-25 menit. Setelah melakukan pendaftaran dan dinyatakan lolos, akan mendapatkan kartu prakerja virtual dengan QR code sebanyak 16 digit. Setelah itu baru memilih pelatihan sesuai keinginan dari penerima kartu prakerja.

Program ini merupakan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan nilai kepada pengguna dan juga memberikan nilai kepada sektor swasta. Ada 8 mitra platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemegang kartu prakerja, yaitu Tokopedia, Skill Academy Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir dan Kemnaker.go.id.<sup>7</sup> Peserta bebas memilih dan mengikuti jenis pelatihan dari berbagai lembaga pelatihan. Saat ini terdapat 1.500 lebih jenis pelatihan dan jumlah ini akan terus bertambah yang dapat dipilih oleh peserta penerima kartu prakerja sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Dengan mengikuti program ini, para pemegang kartu prakerja akan mendapatkan bantuan biaya atau insentif dengan total Rp.3.550.000 dengan rincian 3 kali kursus, untuk bantuan manfaat yang dibagi 4 bulan dan insentif pengisian survei yang dibagi 3 kali pencairan. Pelatihan ini dilakukan secara online.

Menurut Yusuf Rendi Manilet seorang pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economic (CORE) menilai pemerintah juga melakukan persiapan pada

---

<sup>7</sup> Nurul Permata Dewi, Skripsi “*Manajemen Pelayanan Public Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Dalam Pengelolaan Program Kartu Pra-Kerja*” (Sumatera Utara: UMSU, 2021), hal. 2.

strategi untuk penciptaan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja.<sup>8</sup> Strategi dasar untuk menciptakan lapangan dan memperluas kesempatan kerja adalah suatu strategi pembangunan yang berorientasi untuk memberi peluang pembukaan lapangan kerja yang produktif dan berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Program Kartu Prakerja telah diluncurkan sejak April 2020. Lebih dari 74 ribu masyarakat Aceh telah mendaftarkan diri sebagai penerima Program Kartu Prakerja, program yang dibuat oleh pemerintah pusat bagi mereka yang terdampak penyebaran Covid-19.<sup>9</sup> Adapun masyarakat Aceh yang dirasakan selama menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja sudah membantu permasalahan perekonomian masyarakat Aceh di masa pandemi covid-19, hanya saja pendampingan untuk peserta yang mau mengikuti program ini tidak ada dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kurang berdampak terhadap penambahan keterampilan penerimanya.<sup>10</sup> Dari segi program kartu prakerja masih belum efektif meningkatkan kompetensi/skill disebabkan pelatihannya dalam bentuk video.

Program Kartu Prakerja di Aceh pernah terjadi manipulasi data website program kartu prakerja. Dua warga di Kabupaten Bireuen, ditangkap akibat memanipulasi data website Kartu Prakerja menggunakan nomor induk

---

<sup>8</sup> Ade Miranti Karunia "Program Kartu Prakerja Diklaim Beri Dampak Positif Ke Masyarakat" Kompas.com, 24 September 2021, hal. 2.

<sup>9</sup> Pemerintah Aceh, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Aceh. Diakses <http://humas.acehprov.go.id/74-ribu-lebih-masyarakat-aceh-mendaftar-jadi-penerima-kartu-prakerja/> pada tanggal 12 November 2022.

<sup>10</sup> Ini yang Disampaikan Penerima Manfaat Kartu Prakerja di Aceh. Diakses <https://dialeksis.com/aceh/ini-yang-disampaikan-penerima-manfaat-kartu-prakerja-di-aceh/> pada tanggal 13 November 2022.

kependudukan (NIK) orang lain. Ratusan juta rupiah uang dari program pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 itu dikuras oleh kedua pelaku.<sup>11</sup> Ini mengakibatkan kerugian besar masyarakat Aceh lainnya yang ingin berkontribusi pada Program Kartu Prakerja. sehingga pemerintah daerah yang mengatur dibidang ketenagakerjaan di Aceh yaitu Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh harus memperhatikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Pada proses observasi awal, peneliti juga menemukan hal yang sama pada proses Program Kartu Prakerja ini berjalan di Aceh, yaitu adanya ketidakterlaksanaanya bimbingan atau fasilitas pendaftar peserta dan pemilihan jenis pelatihan Program Kartu Prakerja.<sup>12</sup> sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang Meningkatkan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada pasal 28 tentang peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan pada proses pelaksanaan program kartu prakerja. tentunya hal ini menjadi perhatian khusus dalam memberikan arahan untuk peserta Program Kartu Prakerja, sehingga peserta Program Kartu Prakerja mengetahui apa yang menjadi peluang mendapatkan pekerjaan. Kemudian terkait dengan pengangguran di Aceh, peserta yang telah mengikuti Program Kartu Prakerja tidak efisien dalam mendapatkan pelatihan diakibatkan melalui online dan tidak mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah daerah untuk daya saing dalam dunia kerja.

---

<sup>11</sup> Pakai NIK Orang Lain, 2 Warga Aceh Kuras Rp150 Juta Dana Insentif Kartu Prakerja, diakses <https://www.merdeka.com/peristiwa/pakai-nik-orang-lain-2-warga-aceh-kuras-rp150-juta-dana-insentif-kartu-prakerja.html> pada tanggal 12 november 2022

<sup>12</sup> wawancara awal dengan beberapa penerima program kartu prakerja pada tanggal 10 februari 2022.



Maka dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penanggulangan Pengangguran Melalui Program Kartu Prakerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh”. Bahwa dalam program kartu prakerja masih kurangnya penyerap lapangan kerja dan belum menjawab persoalan utama pengangguran ditengah pandemi covid-19.

## 1.2 Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian.<sup>13</sup> Ketika peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, maka peneliti mengambil langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dari fenomena yang diamati tersebut. Jadi dari latar belakang diatas peneliti mengambil langkah yaitu mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Penanggulangan pengangguran melalui Program Kartu Prakerja dinilai masih lemah.
2. Lemahnya Program Kartu Prakerja, sehingga dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh dinilai masih lemah.

## 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam sebuah karya ilmiah penelitian adalah hal dasar dalam membuat skripsi, rumusan masalah akan menjadi penentu apa bahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dibuat didasarkan pada masalah pokok yang menjadi latar belakang masalah tersebut. Maka peneliti

---

<sup>13</sup> Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), hal. 135.

merumuskan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penanggulangan pengangguran melalui Program Kartu Prakerja?
2. Apa saja peluang dan tantangan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan oleh penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan pengangguran melalui Program Kartu Prakerja.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini secara kegunaan praktis dan kegunaan teoritis sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pemerintah khususnya *stakeholder* yang terlibat langsung dalam penanganan penanggulangan pengangguran melalui program kartu prakerja untuk dapat ditinjau dalam mengurangi angka pengangguran di

Aceh serta mengetahui peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program kartu prakerja.

## 2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat menjadikan landasan atau wawasan dan pengembangan bagi peneliti-peneliti yang lain dalam melaksanakan penelitiannya yang sejenis, sehingga dengan penelitian ini membantu untuk dijadikan referensi bagi peneliti yang lainnya.

### 1.6 Penjelasan Istilah

Uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Penanggulangan pengangguran.

Penanggulangan adalah proses mengelola permintaan (eksternal atau internal) yang di nilai sebagai beban atau melebihi sumber daya manusia.<sup>14</sup>

Dimana suatu upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang mencakup aktivitas. sedangkan pengangguran adalah penduduk berusia dari 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.<sup>15</sup> Penanggulangan pengangguran adalah segala upaya untuk mengatasi permasalahan yang belum bekerja atau pengangguran tersebut dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi pemerintah dan sumber daya manusia.

---

<sup>14</sup> Ahmaf Rusdiana, *Organisasi Lembaga Pendidikan* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD & Pustaka Tresna Bhakti Press Bandung, 2021), hal. 198.

<sup>15</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Pembangunan Islam Sebuah Prinsip, Konsep Dan Asas Falsafahnya* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), hal. 114.

## 2. Program kartu prakerja

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.<sup>16</sup> Kartu prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program kartu prakerja. dimana kartu prakerja digunakan untuk mendapatkan manfaat yaitu pelatihan dan insentif.



---

<sup>16</sup> PERPRES Nomor 36 Tahun 2020, Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti tesis, disertasi atau jurnal penelitian, skripsi, dan lain sebagainya. Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan acuan dan perbandingan agar menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, tahun dan judul	Metodelogi penelitian	Hasil penelitian
1	Nurul permata dewi, 2021, Manajemen Pelayanan Public Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Dalam Pengelolaan Program Kartu Pra-Kerja.	Kualitatif deskriptif.	manajemen pelayanan publik dinas ketenagakerjaan kota medan dalam pengelolaan program kartu prakerja belum dilaksanakan dengan baik. Sistem pelayanan publik yang diberikan terhadap program kartu prakerjas, belum dilaksanakan dengan baik, proses perencanaan pelayanan publik berdasarkan kebijakan pusat, prosedur pelaksanaan pelayanan publik belum dikatakan baik dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengkoordinasian pelayanan public dilakukan dengan baik serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pelaksanaan program kartu pra-kerja belum dilakukan secara efektif dan efisien,



			pendampingan atau sosialisasi belum dilaksanakan secara langsung dan maksimal serta dampak yang dirasakan dari program kartu pra-kerja sangat signifikan dan membantu perekonomian masyarakat kota medan. Masyarakat berharap program ini tetap lanjut dan lebih baik lagi kedepannya.
2	Rinda mayang sari, 2021, Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.	Kualitatif.	implementasi kebijakan program kartu prakerja di dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sumatera selatan tahun 2020 sudah berjalan dengan cukup baik dengan beberapa aspek yang sudah terpenuhi dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja, walaupun harus ada beberapa optimalisasi pada aspek-aspek tertentu.
3	Keren Bertine Janice Lalamentik, 2021, Collaborative Governance dalam Meningkatkan Kualitas Para Pencari Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Studi Di Platform Edukasi Kreatif “Lingkaran”).	Deskriptif kualitatif.	kolaborasi yang terjalin antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan mitra platform digital berjalan dengan baik sehingga sampai kebagian paling terkecil pun seperti para Lembaga pelatihan lainnya, yaitu platform edukasi kreatif lingkaran kegiatan proses pemfasilitasan kelas pelatihan program kartu prakerja dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga didasari oleh perjanjian Kerjasama yang diadakan oleh mitra platform digital dengan lingkaran yang mengikat sehingga kegiatan Kerjasama dapat dipertanggungjawabkan. Dibuktikan dengan para peserta yang menjadi informan peneliti menyatakan merasa terbantu dengan pelatihan tersebut. Kompetensi mereka pencari

			kerja meningkatkan dan dana insentif yang diberikan membantu. Pelatihan yang diberikan pun peserta rasa sudah cukup baik dan penyampaianya mudah dimengerti. Kolaborasi menghasilkan outcomes yang baik yaitu peserta terserap ke dunia kerja.
--	--	--	--

Pada tabel diatas merupakan penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan dan perbandingan agar menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian berjudul Penanggulangan Pengangguran melalui Program Kartu Prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Jadi pada tabel diatas merupakan perbedaan judul sehingga hasilnya pun berbeda.

## 2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah yang mengandung konsekuensi moral yang didalamnya terdapat keterikatan terhadap kepentingan rakyat banyak.<sup>17</sup> Mengenai kebijakan publik, Wahab menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c. Kebijakan publik berkaitan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi

<sup>17</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit AIPI, 2006), hal. 15.

suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu<sup>18</sup>

James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan

yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.<sup>19</sup>

Kebijakan publik bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah.<sup>20</sup>

Menurut Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.<sup>21</sup>

Kebijakan publik yang akan diterapkan melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya:<sup>22</sup>

- a. Identifikasi masalah kebijakan
- b. Penyusunan agenda
- c. Perumusan kebijakan
- d. Pengesahan kebijakan
- e. Implementasi kebijakan
- f. Evaluasi kebijakan

<sup>18</sup> Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik", Vol.11 No. 01, 2017, hal. 3.

<sup>19</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hal. 24.

<sup>20</sup> Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 20.

<sup>21</sup> Miftah Thoaha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: kencana, 2014), hal. 107.

<sup>22</sup> Sholih Muadi, Ismail, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", Jurnal Publik, Vol. 6, No. 2, Desember, 2016.

Menurut Willam N. Dunn siklus dalam proses penyusunan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Penyusunan Agenda (Perumusan Masalah)

Perumusan masalah merupakan tahapan dimana asumsi-asumsi yang tersembunyi ditemukan, kemudian didiagnosis penyebabnya, dipetakan tujuan yang memadukan pandangan yang bertentangan, serta dirancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Pada tahap penyusunan agenda inilah terdapat ruang untuk memaknai apa yang disebut dengan masalah publik serta akan dipertarungkan agenda publik berdasarkan prioritasnya.

2. Formulasi Kebijakan (Peramalan)

Tahapan formalasi kebijakan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan kebijakan terkait masalah yang akan terjadi pada masa mendatang baik diakibatkan oleh alternatif yang diambil maupun tidak melakukan apapun. Masalah publik yang telah masuk dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh pembuat kebijakan untuk diidentifikasi dan kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut diperoleh dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Adopsi Kebijakan (Rekomendasi)

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya pada masa mendatang telah diestimasi melalui perencanaan. Rekomendasi membantu para pembuat kebijakan untuk memperkirakan tingkat resiko dan

---

<sup>23</sup> Chazali H. Situmorang, *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, (Depok: Social Security Development Institute, 2016), hal. 5-9.

ketidakpastian, mengenal eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, serta menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

#### 4. Implementasi Kebijakan (Pemantauan)

Implementasi adalah tahapan pelaksanaan kebijakan untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan atau dapat dikatakan sebagai sebuah langkah penerapan atau uji coba kebijakan oleh pemerintah untuk diberlakukan pada masyarakat luas. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menentukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

#### 5. Evaluasi Kebijakan (Penilaian)

Evaluasi merupakan tahapan dimana sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai baik itu menyangkut dengan substansi, penerapan, maupun dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Penilaian tersebut akan membuahkan pengetahuan yang relevan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diterapkan dan yang dihasilkan.

### 2.3 Penanggulangan Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa yang disebut pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan



karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.<sup>24</sup> Jika pengangguran tidak diatasi, hal ini akan berdampak pada tenaga kerja dan menurunnya sumber daya manusia (SDM).

### 2.3.1 Pengertian Pengangguran

Penganggur merupakan bagian dari angkatan kerja yang sekarang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat memperolehnya.<sup>25</sup> pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Tingkat pertumbuhan Angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relative lambat menyebabkan masalah pengangguran.<sup>26</sup>

Sebelum kita melakukan pengelompokan terhadap masing-masing jenis pengangguran, perlu kita ketahui beberapa "dimensi" pengangguran, antara lain berikut ini:<sup>27</sup>

- a. Waktu, banyak di antara mereka yang ingin bekerja lebih lama, misalnya jam kerjanya per hari, per minggu atau per tahun.
- b. Intensitas pekerjaan, yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan.

<sup>24</sup>Agung Nurrahman, "Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran di Indonesia". Jurnal Registratie. Vol. 2. No. 1, Februari 2020, hal. 2.

<sup>25</sup> Gatingsih dan Eko Sutrisno, *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017), hal. 102.

<sup>26</sup> Gatingsih dan Eko Sutrisno, *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017), hal. 103.

<sup>27</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hal. 5. 31.



- c. Produktivitas, kurangnya produktivitas sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer dalam melakukan pekerjaan.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>28</sup> Berkepanjangan Pengangguran juga dapat menimbulkan efek tidak baik bagi psikologis terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*), Setengah Menganggur (*Under Unemployment*), dan Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*).

*Pertama*, Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.<sup>29</sup>

Tenaga kerja yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahliannya. Misalnya, seorang insinyur teknik, bekerja sebagai pelayan

---

<sup>28</sup> Gatningsih dan Eko Sutrisno, *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017), hal. 103.

<sup>29</sup> Muhdar HM, "*Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dankemiskinan di Indonesia: Masalah Dan Solusi*", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2015), hal. 46

restoran.<sup>30</sup> *Kedua*, Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.<sup>31</sup> *Ketiga*, Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.<sup>32</sup> Pengangguran ini terjadi karena tidak adanya lapangan pekerjaan atau karena ketidaksesuaian lapangan kerja dengan latar belakang pendidikan dan keahlian tenaga kerja.<sup>33</sup>

### **2.3.3 Menanggulangi Pengangguran Terhadap Kemiskinan**

Penanggulangan pengangguran dan kemiskinan bukanlah masalah yang disepelekan melainkan menjadi prioritas penanganan pengangguran. Mengatasi pengangguran dan kemiskinan itu tindakan yang dilakukan ketika masalah ini menjadi isu nasional. Hal inilah yang menjadi faktor utama mengapa pengangguran dan kemiskinan sulit dicegah karena penanganan permasalahan tidak dipersiapkan sebelumnya.

Secara umum cara menanggulangi pengangguran dengan cara meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), transfer

---

<sup>30</sup> Gatingsih dan Eko Sutrisno, *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017), hal. 105.

<sup>31</sup> Muhdar HM, "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dankemiskinan di Indonesia: Masalah Dan Solusi", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2015), hal. 46

<sup>32</sup> Muhdar HM, "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dankemiskinan di Indonesia: Masalah Dan Solusi", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2015), hal. 46.

<sup>33</sup> Gatingsih dan Eko Sutrisno, *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017), hal. 104.

teknologi dan penemuan teknologi baru, pembenahan perangkat hukum dalam bidang ketenagakerjaan, dan lain-lain. Terdapat beberapa cara menanggulangi pengangguran yang dapat dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi pengangguran sebagai berikut:

1. Pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas.
2. Pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil, sebagaimana prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan.
3. Pembangunan lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Hal itu dapat dilakukan serentak dengan program kartu prakerja. Dengan membangun program kartu prakerja, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus.

#### **2.4 Konsep Ketenagakerjaan**

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada

waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerjanya.<sup>34</sup> Di dalam pelaksanaan pembangunan, ketenagakerjaan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan terhadap masyarakat dengan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>35</sup>

#### **2.4.1 Pengertian ketenagakerjaan**

Menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: kesempatan kerja, pelatih kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengpahan dan kesejahteraan tenaga kerja.<sup>36</sup>

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.<sup>37</sup> Sehingga tenaga kerja (employed) dapat dibagi tiga, sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Harnida Gigih Aryanti dkk, *Ketenagakerjaan* (Klaten: Cempaka Putih, 2015), hal. 1.

<sup>35</sup> Undang-undang RI No.13 Tahun 2003. Tentang ketenagakerjaan.

<sup>36</sup> Undang-undang RI No.13 Tahun 2003. Tentang ketenagakerjaan.

<sup>37</sup> BPS Aceh. Tenaga Kerja, diakses <https://aceh.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1>, pada tanggal 2 Februari 2022.

1. Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja  $> 35$  jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas;
2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja  $< 35$  jam seminggu; dan
3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja  $0 > 1$  jam perminggu.

Tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.<sup>38</sup>

#### **2.4.2 Jenis-jenis Tenaga kerja**

Jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Diuraikan sebagai berikut:

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan golongan penduduk dalam batas usia kerja yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, mempunyai pekerjaan tetap, tetapi untuk sementara tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, tetapi aktif mencari pekerjaan. Kata bekerja mengandung arti melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh penghasilan pada suatu waktu tertentu. Dengan demikian, angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau sedang berusaha untuk bisa terlibat dalam

---

<sup>38</sup> Murti Sumarni dan John Suprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hal. 5.



kegiatan produktif. Angkatan kerja terbagi menjadi dua bagian, yaitu Angkatan kerja bekerja dan tidak bekerja atau penganggur.<sup>39</sup>

a. Bekerja

Menurut BPS, seseorang dikatakan bekerja apabila ia melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan selama paling sedikit satu jam secara terus-menerus dalam seminggu sebelum survei dilakukan. Dengan demikian, orang yang memiliki pekerjaan, orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi sementara waktu sedang tidak bekerja (misalnya, seorang karyawan yang sedang mengambil cuti) dan juga pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha produktif termasuk dalam kelompok pekerja.

b. Penganggur

Penganggur adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Penganggur semacam ini dikategorikan sebagai penganggur terbuka. Selain penganggur terbuka, seseorang yang bekerja, tetapi tidak penuh dalam arti ia tidak dimanfaatkan secara optimal dilihat dari sisi jam kerja yang digunakan dan produktivitas kerjanya, dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur. Setengah penganggur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu setengah penganggur kentara, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, dan setengah penganggur tidak kentara, yaitu mereka yang bekerja, tetapi sebenarnya produktivitas dan pendapatannya rendah.

---

<sup>39</sup> Harnida Gigih Aryanti dkk, *Ketenagakerjaan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2015), hal. 3.



## 2. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan (pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga), serta menerima pendapatan, tetapi bukan imbalan langsung atas suatu kegiatan produktif (perunan, veteran perang, dan penderita cacat yang menerima santunan).

### 2.5 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya mengganggu dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Istilah SDM (sumber daya manusia) mencakup semua yang terdapat dalam diri manusia yang antara lain terdiri atas dimensi dimensi yaitu fisik manusia, psikis manusia, sifat atau karakteristik manusia, pengetahuan dan keterampilan manusia juga yang terakhir adalah pengalaman manusia.<sup>40</sup>

#### 2.5.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah proses pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses dimaksud melibatkan organisasi, arahan, koordinasi dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia adalah

---

<sup>40</sup> Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Teori Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 1.

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberi balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.<sup>41</sup>

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa, dan karsa). semua potensi SDM (sumber daya manusia) tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.<sup>42</sup>

Teori sumber daya manusia (human resource) mengandung berbagai makna sehingga Hasibuan menyebutkan bahwasanya Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang ada dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendirinya serta seluruh potensi di dalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

### **2.5.2 Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada penerima program kartu prakerja. Pelatihan menentukan juga untuk sumber daya manusia lebih efektif pada pekerjaannya. Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar melalui meningkatkan keahlian, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program. Pengembangan adalah aktivitas yang membantu untuk merencanakan kegiatan untuk meningkatkan pengembangan diri secara maksimal

---

<sup>41</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hal. 7.

<sup>42</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana 2009), hal. 3.

### 2.5.3 Produktivitas Kerja

Produktivitas tenaga kerja sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama ketika semakin sulit untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi tanpa adanya lebih banyak investasi. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pencapaian produktivitas tenaga kerja di masa mendatang.<sup>43</sup>

Produktivitas adalah hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan masukan yang sebenarnya. produktivitas kerja juga merupakan perbandingan antara output dengan input, dimana output harus mempunyai nilai tambah dan teknik pengerjaannya yang lebih baik.

Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator, yaitu sebagai berikut.<sup>44</sup>

1. Kemampuan, Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada ketrampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja.
2. Meningkatkan hasil yang dicapai, Hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut.
3. Semangat kerja, Merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin
4. Pengembangan diri, Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi.
5. Mutu, Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai.

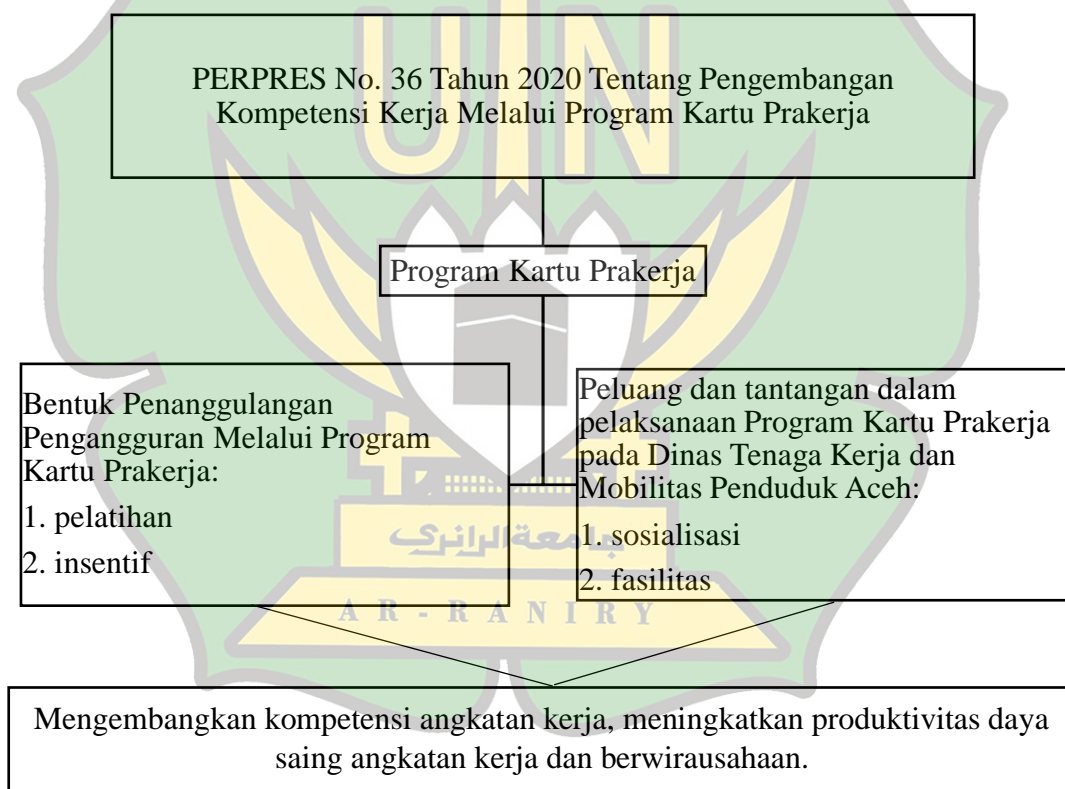
<sup>43</sup> Khotim Fadhil, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Produktivitas Kerja)*, (Jombang: Guepedia, 2021), hal. 15.

<sup>44</sup> M. Naely Azhad dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jember: Cahaya Ilmu, 2015), hal. 44.

6. Efisiensi, efisiensi merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan yang telah disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan serta keterkaitan antar variabel yang diteliti.



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmu sosial umumnya yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik dan yang berusaha untuk menafsirkan makna dari data ini yang membantu peneliti memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan.<sup>45</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.<sup>46</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Maka seorang peneliti kualitatif itu orang yang memiliki sifat *open minded*.<sup>47</sup> Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti, dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

---

<sup>45</sup> S. Aminah Dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Surabaya: Kencana, 2019), hal.57.

<sup>46</sup> Marsudi W. Kismono Dan Iwan Sofana, *Menulis Karya Ilmiah*, (Bandung: Informatika Bandung,2017), hal. 68.

<sup>47</sup>Muhammad Hasan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jawa Tengah: Tahta Media Group,2022), hal. 8.



### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah acuan mengenai dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Didalam penelitian kualitatif, fokus penelitian adalah hal yang paling penting, karena fokus penelitian merupakan titik fokus yang menjadi obyek penelitian.<sup>48</sup> Titik fokus menjadi titik pusat dalam penelitian kualitatif, maka titik fokus yang baik tidak mulai dari pemikiran yang sederhana dan mudah dipahami.

Fungsi fokus dalam penelitian adalah untuk memberikan batasan penelitian, agar tidak terjadi kekeliruan akibat perbedaan pemahaman antara pembaca dan peneliti.<sup>49</sup> Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang bersifat pokok masalah yang masih bersifat umum. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitiannya dalam satu atau lebih variabel.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan pada suatu fokus yang mana pada dasarnya fokus penelitian ini sebagai bahan dasar acuan yang diteliti. Penelitian ini yang akan dilakukan ini terfokuskan pada "Penanggulangan Pengangguran Melalui Program Kartu Prakerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh", dimana rumusan masalah yang difokuskan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.65.

<sup>49</sup>Asri Putri, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Gobiz*" (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), hal. 5.



- a. Bagaimana bentuk penanggulang pengangguran melalui Program Kartu Prakerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh?

**Tabel 3.1**  
**Dimensi dan Indikator Penanggulangan Pengangguran.**

No	Dimensi	Indikator
1.	Pelatihan.	a. Kompetensi. b. Pencari kerja.
2.	Insenitf	a. Bantuan biaya. b. Jumlah biaya.

*Sumber: PERPRES No 36 Tahun 2020.*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa peneliti ingin meneliti mengenai penanggulang pengangguran melalui program kartu prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Pada fokus penelitian penanggulangan pengangguran ada dua dimensi yaitu pelatihan dan program kartu prakerja. pertama, pelatihan memiliki dua indikator yaitu bantuan biaya dan jumlah biaya. Bantuan biaya yang peneliti lihat apakah bantuan biaya yang didapatkan oleh penerima kartu prakerja ini bisa digunakan sebaik mungkin untuk kehidupan dalam mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha. Jumlah biaya yang peneliti lihat apakah nominal yang diberikan oleh pemerintah sesuai kebutuhan. Kedua, program kartu prakerja memiliki dua indikator yaitu kompetensi dan pencari kerja. Kompetensi yang peneliti lihat apakah kompetensi terdapat pada program kartu prakerja ini membantu meningkatkan kemampuan kerja dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Pencari kerja yang peneliti lihat apakah pencari kerja setelah mendapatkan ini program kartu prakerja ini dapat mencari kerja sesuai keahliannya.

- b. Apa saja peluang dan tantangan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja?

**Table 3.2**  
**Dimensi dan indikator pelaksanaan program kartu prakerja.**

No	Dimensi	Indikator
1.	Peluang dan tantangan.	a. Faktor internal. b. Faktor eksternal.
2.	Pelaksanaan	a. Sosialisasi. b. Fasilitas pendaftaran.

*Sumber : PERPRES No 36 Tahun 2020.*

Pada tabel diatas untuk permasalahan kedua yaitu peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program kartu prakerja. Pada fokus penelitian ini peneliti ingin melihat pelaksanaan program kartu prakerja, pelaksanaan program kartu prakerja ada dua dimensi yaitu peluang dan tantangan serta pelaksanaan. Pertama, peluang dan tantangan harus ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal dengan berpaduan dari PERPRES No 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Kedua, pelaksanaan ditinjau dari sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah ke masyarakat dan fasilitas pendaftaran apakah dilaksanakan sesuai peraturan yang terdapat pada PERPRES No. 36 Tahun 2020.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian.<sup>50</sup> Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti untuk memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi penelitian harus didasarkan pada pertimbangan

<sup>50</sup> Iwan Hermawan, *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi*, (Kerawang: Hidayatul Quran, 2019) hal. 131.

sesuai dengan topik yang dipilih sehingga mendapat data dan hasil dalam penelitian.<sup>51</sup>

Dalam penelitian kualitatif penentuan lokasi adalah hal penting, maka penelitian menentukan lokasi sesuai pertimbangan peneliti melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh. Peneliti menentukan lokasi penelitian ini untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan. Dengan begitu peneliti dapat mengetahui penanggulangan pengangguran melalui program kartu prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh serta peluang dan tantangan pada pelaksanaan program kartu prakerja.

Alasan penentuan lokasi ini disebabkan peneliti melihat masih banyaknya kasus atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat yang dikategorikan pengangguran sehingga dengan mengambil lokasi ini maka peneliti mendapatkan pemerintah lebih memantau kesenjangan sosial.

#### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan juga data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif dilakukan secara *purposive*, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau tujuan tertentu.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Eko Sudarmanto dkk, *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, (Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 207.

<sup>52</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hal. 138.

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh, maka daripada itu sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>53</sup>

a. Data primer

Data primer atau data asli merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Data ini diperoleh melalui responden yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>54</sup> Sumber data ini dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan informan saat terjun langsung kelapangan tempat penelitian.

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, misalnya narasumber atau informan.<sup>55</sup> Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Dalam hal ini sumber data utamanya sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas
2. Penerima Program Kartu Prakerja.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang turunan dari data primer. Data ini berasal dari hasil olah data primer.<sup>56</sup> Data sekunder adalah sumber data diluar

---

<sup>53</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010) hal. 157.

<sup>54</sup> Eko Sudarmanto dkk, *Metode Riset Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2022), hal. 98.

<sup>55</sup> Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pati: Al Qalam Media Lestari, 2022), hal. 117.

<sup>56</sup> Eko Sudarmanto dkk, *Metode Riset Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2022), hal. 98.

kata-kata dan Tindakan, sumber data tersebut berupa sumber data tertulis. Sumber data ini diperoleh dari buku, arsip, serta dokumentasi.

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain. Misalnya buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia data.<sup>57</sup> Dalam hal ini sumber data sekundernya sebagai berikut:

1. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Program kartu prakerja.
2. Dokumentasi antara peneliti dan informan.

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi *social situation* atau situasi sosial. Situasi sosial terdiri dari tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*).<sup>58</sup> Sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden tetapi sebagai sebagai narasumber, partisipasi atau informan dalam penelitian.<sup>59</sup>

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>60</sup> Pertimbangan tertentu disebut sebagai orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan dalam mendapat data

---

<sup>57</sup> Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pati: Al Qalam Media Lestari, 2022), hal. 117.

<sup>58</sup> Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Penerbit Askara Timur, 2017), hal. 17.

<sup>59</sup> Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Penerbit Askara Timur, 2017), hal. 18.

<sup>60</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hal. 137.



penelitian. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian sebagai berikut:

**Table 3.3**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas	1
2.	Masyarakat Penerima Kartu Prakerja	4
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

Informan penelitian yang diambil dari lingkungan di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dan masyarakat yang mendapatkan kartu prakerja. perwakilan yang peneliti ambil sampel dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh yaitu kepala seksi . Masyarakat penerima kartu prakerja di Aceh sebanyak 4 orang. Tujuan dipilihnya informan diatas ini dalam penelitian ini adalah orang yang menurut peneliti paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam menanggulangi pengangguran di Aceh serta masyarakat penerima kartu prakerja yang merasakan manfaatnya. Sehingga dengan informan ini peneliti mendapatkan data dari sumber yang akurat.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Istilah Teknik pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data, dimana tahap metode penelitian yang digunakan haruslah dilakukan pencatatan secara detail, lengkap, teliti dan jelas. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif. Observasi atau pengamatan adalah metode atau cara-cara menganalisis dan



mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individual atau kelompok dan lingkungannya secara langsung.<sup>61</sup>

Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terlepas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lain.<sup>62</sup> Di dalam penelitian kualitatif, jenis-jenis observasi ada dua yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif.<sup>63</sup>

#### 1. Observasi Partisipan.

Observasi Partisipan adalah peneliti menjadi bagian dari tim, kelompok masyarakat atau budaya. Tujuan observasi partisipan adalah untuk mendapatkan empati budaya dengan mengalami fenomena tertentu, jenis observasi ini serupa dengan pendekatan partisipan sebagai observer dimana peneliti berpartisipasi penuh dalam fenomena yang diteliti.<sup>64</sup>

Observasi partisipan sebagai peneliti yang terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Penelitian observasi partisipatif ini dengan tujuan menggali dan mengkaji sesuatu atau peristiwa yang baru. Fenomena yang belum banyak diketahui oleh orang banyak, sehingga ingin diteliti lebih mendalam lagi.

---

<sup>61</sup> Marsudi W. Kismono dan Iwan Sofana, *Menulis Karya Ilmiah*, (Bandung: Informatika Bandung, 2017), hal. 118.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 145.

<sup>63</sup> Haudi, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 161.

<sup>64</sup> Haudi, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 161.

## 2. Observasi non partisipan.

Observasi non partisipan adalah peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung. Observasi non partisipatif adalah tindakan penelitian yang dilakukan apabila peneliti tidak ikut serta dalam ambil bagian kehidupan informan.

Observasi non partisipan sebagai pengamat bukan bagian dari sistem atau masyarakat yang diobservasi. Observasi ini sebagai pendekatan observer sebagai peserta dimana peneliti hanya mewawancarai peserta. Jenis observasi ini digunakan untuk pengumpulan data dari masyarakat setempat dalam penelitian ini.<sup>65</sup>

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini, observasi non partisipan sebagai pengamat dari Program Kartu Prakerja bukan bagian dari keikutsertaan atau masyarakat yang mengikuti Program Kartu Prakerja yang diobservasi.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pencarian data untuk tujuan penelitian melalui tanya-jawab pendapat, pandangan, pengamatan seseorang, sambil menatap muka antara peneliti dan informan.<sup>66</sup> Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data

---

<sup>65</sup> Haudi, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 161.

<sup>66</sup> Marsudi W. Kismono dan Iwan Sofana, *Menulis Karya Ilmiah*, (Bandung: Informatika Bandung, 2017), hal. 121.

yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti.<sup>67</sup>

Jenis-jenis wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.<sup>68</sup>

1. Wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti mengumpulkan data dan sudah menyiapkan pertanyaan. Pertanyaan tersebut peneliti telah merancang dengan pasti tentang informasi apa yang di butuhkan. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data dengan mencatatnya atau menggunakan perekaman.

2. Wawancara semi terstruktur.

Jenis wawancara semi terstruktur sudah termasuk dalam kategori *in-dep interview* (wawancara mendalam), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti

---

<sup>67</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hal. 143.

<sup>68</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 73.

perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

### 3. Wawancara tak terstruktur.

Wawancara seperti ini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menginginkan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>69</sup>

Untuk itu peneliti mengambil penelitian metode wawancara semi terstruktur. Dimana wawancara ini bersifat *in- dep interview* (wawancara mendalam), peneliti mewawancarai yang berkaitan dengan program kartu prakerja yaitu Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas dan masyarakat yang mendapatkan program kartu prakerja. Sehingga peneliti mendapatkan data dan hasil yang diperlukannya dalam melakukan wawancara penelitian ini.

#### c. Dokumentasi.

Dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.<sup>70</sup> Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen dan hal-hal yang memiliki

<sup>69</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 73.

<sup>70</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hal. 150.

keterkaitan dengannya, yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari Teknik observasi dan wawancara. Artinya hasil penelitian kualitatif lebih akurat, kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen yang ada. Dokumen tersebut berfungsi untuk menyelaraskan, meluruskan dan atau menguatkan hasil observasi dan wawancara.<sup>71</sup> Dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan yang dibutuhkan untuk melengkapi data.<sup>72</sup>

### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yaitu triangulasi. Artinya triangulasi sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>73</sup> Teknik triangulasi ada empat, yaitu teknik triangulasi data, teknik triangulasi metode, teknik triangulasi peneliti dan teknik triangulasi teori.<sup>74</sup>

- a. Triangulasi data yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda.
- b. Triangulasi metode yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan Teknik atau pengumpulan data yang berbeda.
- c. Triangulasi peneliti yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.

---

<sup>71</sup> M. Sobry Sutikno Dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Hoslitica, 2020), hal. 130.

<sup>72</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hal. 150.

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 241.

<sup>74</sup> Abd. Hadi, Asrori dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, (Jawa Tengah : Cv. Pena Persada, 2021), hal. 66.



- d. Triangulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan tertarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

Kesimpulan dari triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dimana data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks di suatu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan informan. Sehingga peneliti menggunakan triangulasi, peneliti dapat mengecek temuannya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori.

Kegiatan pada analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kejenuhan data dapat dilihat dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Analisis data terdapat tiga tahap yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data serta tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>75</sup>

- a. Tahap reduksi data, peneliti dituntut harus memiliki kemampuan berfikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.
- b. Tahap penyajian data, penyajian data dilaksanakan agar data hasil reduksi tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dalam merencanakan kerja penelitian selanjutnya.
- c. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih tidak jelas menjadi jelas setelah diteliti.

---

<sup>75</sup> Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 400.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian**

Berikut ini adalah ulasan umum mengenai gambaran lembaga/lokasi penelitian. Dimana lokasi penelitian untuk skripsi ini, mengambil tempat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dan masyarakat Aceh yang mendapatkan Program Kartu Prakerja. Oleh karena itu untuk mengetahui gambaran umum ini peneliti memperoleh data di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai Penanggulangan Pengangguran melalui Program Kartu Prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Dalam hal ini peneliti melakukan gambaran umum yang akan disajikan meliputi gambaran umum Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, uraikan sebagai berikut:

##### **4.1.1 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh**

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk.<sup>76</sup> dibawah ini ada tabel tentang jumlah pegawai per golongan dan jumlah pegawai per pendidikan yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pegawai Per Golongan**

No	Golongan	Jumlah pegawai
1	Golongan IV	14
2	Golongan III	163
3	Golongan II	36
4	Golongan I	1
<b>TOTAL</b>		<b>214</b>

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh*

Tabel diatas merupakan tabel tentang jumlah pegawai pergolongan yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Tabel 4.1 golongan terbanyak jumlah pegawai golongan III dengan jumlah pegawai 163 pegawai. Golongan paling sedikit hanya golongan I dengan jumlah pegawai 1. Seluruh pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh 214 pegawai.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Pegawai Per Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah pegawai
1	SD	-
2	SLTP	3
3	SLTA	49
4	SARJANA MUDA/ D-3	14
5	D-4 TRANSMIGRASI	1
6	SARJANA/ S-1	125
7	PASCA SARJANA/ S-2	22
<b>TOTAL</b>		<b>214</b>

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh*

Pada tabel 4.2 jumlah pegawai per pendidikan dengan total pegawai 214 pegawai sesuai berdasarkan pendidikan yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Bahwasanya pendidikan merupakan aset terpenting untuk mempunyai peranan sesuai keahlian dengan adanya pendidikan tertinggi maka sumber daya aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh sesuai kualitas.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

a. VISI :

Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrai yang Produktif Maju, Mandiri dan Sejahtera

b. MISI :

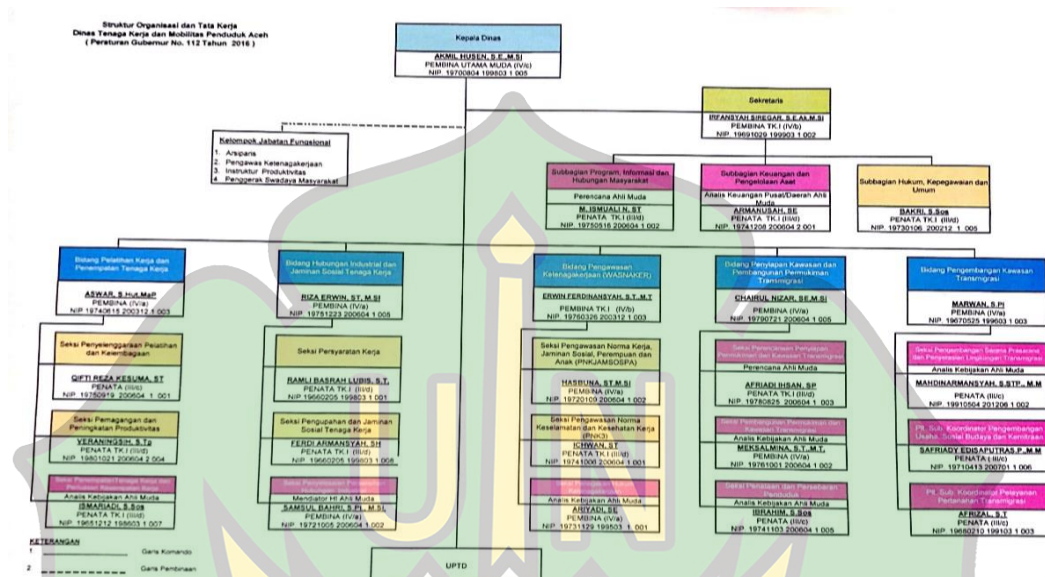
- 1) Menciptakan tenaga kerja transpil produktif dan mempunyai kompetensi kerja.
- 2) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja.
- 3) Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan.
- 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) transmigrasi dan penyebaran perpindahan penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota.
- 5) Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
- 6) Mengembangkan desa transmigrasi produktif menuju desa maju dan mandiri.<sup>77</sup>

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dikendalikan oleh 5 (lima) bidang, 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) UPTD sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Umum di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh serta Peraturan

<sup>77</sup> Visi Misi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh diakses melalui <https://disnakermobduk.acehprov.go.id/index.php/page/6/visi-misi> diakses pada tanggal 1 juli 2022

Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

### 2.5.4 Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh secara umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan urusan Kesekretariatan dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- 2) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- 3) Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian.



- 4) Penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
- 5) Penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan.
- 6) Penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program Ketransmigrasian.
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

### 2.5.5 Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan penempatan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia, pelatihan kerja, peningkatan instruktur dan kelembagaan, pemagangan, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan izin tenaga kerja asing. Bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja mempunyai tugas melakukan fasilitasi pelatihan, pemagangan, peningkatan instruktur, kelembagaan, produktivitas tenaga kerja, tenaga kerja mandiri dan siap pakai, penciptaan wirausaha baru, tenaga kerja sukarela, perluasan kesempatan kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja antar daerah, antar negara, perizinan dan pembatasan tenaga kerja asing.<sup>78</sup> Bidang Pelatihan Kerja dan penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas kepada seksi-seksinya, sebagai berikut:

1. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Kelembagaan

Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Kelembagaan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a) Merancang promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja.
- b) Merencanakan pelaksanaan dan pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja, serta pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelatihan kerja.
- c) Merencanakan penyiapan assessor akreditasi.

<sup>78</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

- d) Merencanakan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi.
- e) Merencanakan penyiapan sarana dan prasarana serta calon peserta pelatihan berbasis kompetensi.
- f) Merencanakan penyiapan program pelatihan kerja.
- g) Merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga kepelatihan.

## 2. Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas

Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a) Merencanakan penyiapan program pemagangan.
- b) Merencanakan sistem dan metode pengembangan produktivitas serta lembaga produktivitas.
- c) Merencanakan promosi peningkatan produktivitas.
- d) Merencanakan pengukuran dan analisis produktivitas tingkat provinsi.
- e) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan produktivitas.
- f) Menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan serta bahan evaluasi dan pelaporan pengukuran produktivitas tingkat provinsi.

## 3. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a) Merancang dan merencanakan promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja).
- b) Merancang kegiatan promosi, penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan serta pelaksanaan perantaraan kerja dalam mendorong perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat.
- c) Merencanakan penyuluhan, bimbingan jabatan dan perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja kepada masyarakat.
- d) Memverifikasi dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- e) Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dan hasil penerbitan perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

- f) Mengklarifikasi penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
- g) Merencanakan penyiapan sarana dan prasarana serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/Kota.
- h) Melakukan verifikasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan verifikasi dokumen pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
- i) Merencanakan penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
- j) Merencanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna.
- k) Merencanakan penyiapan program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
- l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

#### **4.2 Hasil penelitian dan pembahasan**

Pada subbab hasil penelitian dan pembahasan ini peneliti membahas serta menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data dan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada para informan terkait yang akan menjawab pertanyaan sesuai permasalahan penelitian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini terfokus pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam pelaksanaan Program Kartu Pakerja. Peneliti melakukan pengumpulan data dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh serta 4 orang dari peserta penerima kartu pakerja.

#### 4.2.1 Bentuk Penanggulangan Pengangguran melalui Program Kartu Prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Bentuk Penanggulangan Pengangguran melalui Program Kartu Prakerja merupakan sebuah perumusan masalah utama yang menurut peneliti harus dilakukan untuk mengetahui apakah Program kartu Prakerja layak untuk digunakan sebagai bantuan sosial untuk mengatasi pengangguran di Aceh. Pengangguran yang ada di Aceh menjadi pusat permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintahan provinsi Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Barang atau jasa yang telah didapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk yang dikategorikan tenaga kerja berumur 15 tahun sampai 64 tahun, maka tenaga kerja tersebut termasuk dalam umur produktif.<sup>79</sup>

**Tabel 4.3**  
**Penerima Kartu Prakerja Berdasarkan Usia Produktif**

No	Usia	Jumlah
1	18-25 tahun	16,9%
2	26-35 tahun	44,26%
3	36-45 tahun	22,16%
4	46-55 tahun	10,8%
5	55 tahun	5,8%

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh*

Pada tabel diatas usia produktif pada pengangguran mulai dari umur 18 tahun sampai 55 tahun merupakan usia produktif untuk bekerja. usia yang peminat

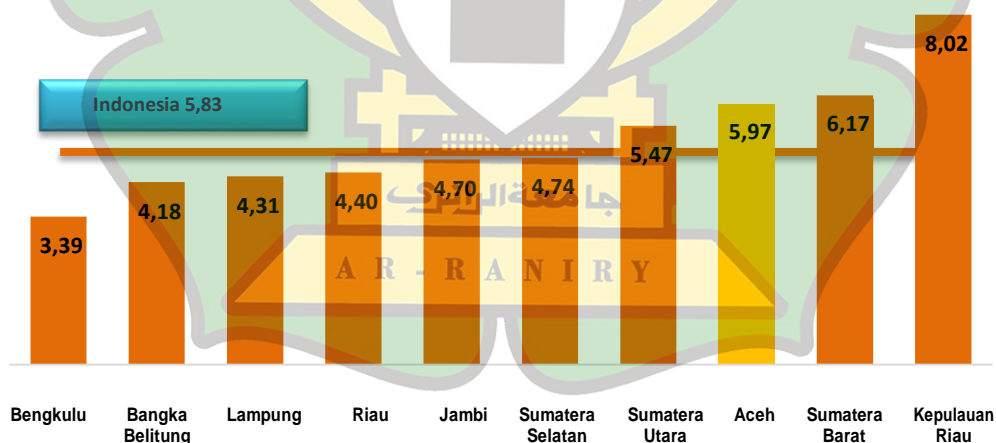
<sup>79</sup> Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

paling banyak pada usia rentang 26-35 tahun sebanyak 44,26% dan usia paling rendah peminat 55 tahun dengan 5,8%.

Pengangguran di Aceh menjadi topik permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan tenaga kerja di Aceh akibat covid-19 melanda untuk masyarakat di Aceh dan pemerintah Aceh yang mempunyai peran penting dalam mengatasi pengangguran sesuai dengan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan wawancara kepala seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas, beliau mengatakan tentang pengangguran di Aceh sebagai berikut:

*“Pengangguran di Aceh masih tinggi, tetapi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh selalu upaya untuk mengurangi angka pengangguran dengan memberikan pelatihan dan pemagangan yang bisa digunakan oleh para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kebutuhan dan kemampuan yang ada pada diri para pencari.”<sup>80</sup>*



**Gambar 4.2 TPT se-Pulau Sumatera, Februari 2022**

*Sumber: BPS Aceh*

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Veraningsih, selaku Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas, pada tanggal 4 Juli 2022



TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Provinsi Aceh masuk kategori ke-3 se-Sumatera tertinggi, dimana TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Provinsi Aceh lebih tinggi, dimana TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) secara nasional hanya sebesar 5,83 persen. Apabila dilihat pada wilayah regional di Sumatera, keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh menempati posisi ke delapan dari 10 provinsi yang ada. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) paling rendah adalah Provinsi Bengkulu sebesar 3,39 persen.

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota**

NO	KABUPATEN/KOTA	TPT (%)
1	Simeulue	5,71
2	Aceh Singkil	8,36
3	Aceh Selatan	6,46
4	Aceh Tenggara	6,43
5	Aceh Timur	7,13
6	Aceh Tengah	2,61
7	Aceh Barat	7,09
8	Aceh Besar	7,7
9	Pidie	7,28
10	Bireuen	4,32
11	Aceh Utara	8,31
12	Aceh Barat Daya	4,04
13	Gayo Lues	1,84
14	Aceh Tamiang	5,87
15	Nagan Raya	4,99
16	Aceh Jaya	3,47
17	Bener Meriah	1,24
18	Pidie Jaya	3,57
19	Banda Aceh	8,94
20	Sabang	3,56
21	Langsa	7,21
22	Lhokseumawe	11,16
23	Subulussalam	6,26
24	Aceh	6,30

*Sumber: Badan pusat statistik Aceh, 2021*

Pada tabel diatas tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh sebanyak 6,30. Angka paling tinggi tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota adalah lhokseumawe dan terendah tingkat pengangguran terbuka kabupaten kota adalah Bener Meriah.

Berdasarkan hasil wawancara dan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh serta data tingkat pengangguran terbuka (TPT) kabupaten/kota diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran di Aceh masih tinggi, sehingga pemerintah berupaya untuk mengatasi pengangguran dengan melalui pelatihan dan pemagangan. pelatihan dan pemagangan yang didapatkan dari pemerintah Aceh dapat digunakan untuk mencari pekerjaan. Berikut ada pelatihan dan insentif yang terdapat pada Program Kartu Prakerja.

#### 1. Pelatihan

Pelatihan sebagai dimensi yang digunakan untuk melihat bagaimana pelatihan yang terdapat pada penanggulangan pengangguran melalui program kartu prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Pelatihan yang terdapat pada program kartu prakerja ini untuk meningkatkan keahlian yang ditunjukkan kepada masyarakat yang mendapatkan program kartu prakerja.

Pelatihan bagi sumber daya manusia sangat penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan adanya pelatihan ini para sumber daya manusia mampu bekerja secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang dimaksud itu para pengangguran yang mendapatkan program kartu prakerja, maka dibawah ini jumlah penerima program kartu prakerja.

**Tabel.4.5**  
**Penerima Program Kartu Prakerja di Aceh**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penerima</b>
Aceh Utara	21.097
Bireun	18.359
Pidie	12.197
Aceh Timur	9.302
Aceh Tamiang	8.447
Aceh Besar	7.951
Lhokseumawe	6.624
Banda Aceh	6.208
Aceh Tenggara	5.978
Pidie Jaya	5.822
Langsa	5.000
Aceh Tengah	4.103
Aceh Selatan	3.966
Bener Meriah	3.673
Subulussalam	3.658
Aceh Barat	2.669
Aceh Singkil	2.496
Aceh Barat Daya	2.233
Aceh Jaya	1.551
Gayo Lues	1.452
Nagan Raya	1.295
Simeulue	965
Sabang	656
<b>Total</b>	<b>135.707</b>

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh*

Pada tabel 4.5 diatas tentang Penerima Program Kartu Prakerja di Aceh dapat kita simpulkan bahwasanya penerima pelatihan dan insentif yang terdapat Program Kartu Prakerja di Aceh terbanyak adalah kabupaten Aceh Utara dan penerima terendah adalah kota sabang.

5 bidang pelatihan paling diminati di Provinsi Aceh	
Sukses bisnis online	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Strategi penjualan</li> <li>•Membuat konten pemasaran</li> </ul>
Gaya hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Teknik tata rias</li> <li>•Belajar merancang busana</li> <li>•Belajar akting</li> </ul>
Makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mengolah makanan sehat</li> <li>•Mengelola usaha warung</li> <li>•Membuat aneka bakso</li> </ul>
Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Memulai bisnis tanpa takut gagal</li> <li>•Menentukan badan usaha</li> <li>•Teknik wawancara bagi HR</li> </ul>
Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Perangkat lunak untuk pekerja dan sekretaris</li> <li>•Kemampuan mengelola waktu</li> </ul>

**Gambar 4.3** lima bidang pelatihan diminati di Provinsi Aceh

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

a. Kompetensi

Kompetensi sebagai indikator yang digunakan untuk melihat bentuk penanggulangan pengangguran melalui program kartu prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Masyarakat Aceh harus memiliki kompetensi diri untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan sikap kerja untuk terjun pada dunia kerja dan mampu bersaing dalam dunia kerja.

Berdasarkan wawancara kepala seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas, beliau mengatakan bahwa:

*Bentuk penanggulang pengangguran dengan program kartu prakerja itu ada 2 yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui program kartu prakerja. pelatihan dan biaya setelah mengikuti pelatihan. Pelatihan tersebut digunakan untuk meningkatkan kompetensi diri para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan membuka lapangan kerja untuk orang lain dengan berwirausahaan. Kompetensi yang didapatkan pada penerima Program Kartu Prakerja yaitu Skilling, Reskilling, dan Upskilling pada pelatihan yang didapatkan<sup>81</sup>*

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Veraningsih, selaku Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas, pada tanggal 4 Juli 2022

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima kartu prakerja menyebutkan sebagai berikut:

*Program kartu prakerja ini memang sangat membantu untuk para kami yang usaha sehari-hari menurun penghasilannya akibat covid. Tetapi dengan adanya program kartu prakerja ini kami bisa meningkatkan keahlian berdagang. Saya sendiri mengambil program tentang kategori penjualan dan pemasaran dengan bisnis online. Alhamdulillah saya terapkan ilmu yang saya dapatkan di program kartu prakerja.<sup>82</sup>*

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima kartu prakerja menyebutkan sebagai berikut:

*Kompetensi yang saya ambil itu dari bukalapak, tentang pengelolaan makanan, makanan ayam bakar yang saya ambil di pelatihan itu diberikan kompetensi mengetahui bumbu dan teknik masak, mengawasi pekerjaan, mengoperasikan peralatan, menegakkan K3 makanan, menilai kualitas makanan dan membuat aneka ayam bakar. Kompetensi yang saya dapatkan saya bisa terapkan di kehidupan saya sebagai ibu rumah tangga. Ilmu yang kita dapatkan di program kartu prakerja ini bermanfaat untuk saya.<sup>83</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kompetensi yang terdapat pada program kartu prakerja mendapatkan manfaat dari pelaksanaan Program Kartu Prakerja berupa *skilling*, *reskilling* dan *upskilling*. *Skilling* adalah mengajarkan skill baru pada peningkatan kompetensi diri, *reskilling* adalah melatih keterampilan terkini, dan *upskilling* adalah meningkatkan efisiensi penyelesaian pekerjaan. Kemudian setelah didapatkan pada kompetensi ini mampu bersaing pada dunia kerja dan mengaplikasikan kompetensi diri yang didapatkan pada Program Kartu Prakerja pada pekerjaan dan kewirausahaan.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Zainiyah Syarif sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 17 Juli 2022

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu putry pelita sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 17 Juli 2022.



b. Pencari kerja

Pencari kerja sebagai indikator yang digunakan untuk melihat bentuk penanggulangan pengangguran melalui program kartu prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Pencari kerja bagian dari angkatan kerja yang sekarang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan.

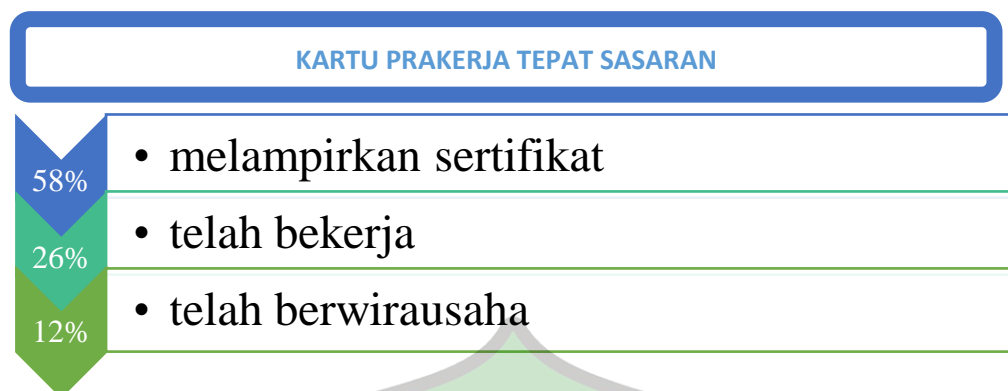
Berdasarkan wawancara kepala Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas, beliau mengatakan bahwa:

*Untuk para pencari kerja mereka harusnya mempunyai soft skill pada diri para pencari-pencaker tersebut dengan memanfaatkan wadah dari pemerintah yang telah diberikan melalui program kartu prakerja. Para pencari kerja mengikuti program kartu prakerja dengan mendaftarkan pada website resmi program kartu prakerja kemudian diverifikasi oleh kartu prakerja setelah itu mengikuti pelatihan sesuai minat dan kebutuhan para pencari kerja setelah itu mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu kita gunakan untuk melamar kerja dengan menyelipkan sertifikat sebagai pendukung untuk melamar bekerja. Pelaksanaan program kartu prakerja sudah tepat sasaran yang sesuai dengan PERPRES No 36 tahun 2020 dan PERPRES no. 76 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja<sup>84</sup>*

Pada wawancara peneliti dengan kepala Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas, mengatakan bahwasanya Program Kartu Prakerja sudah tepat sasaran sesuai data administrasi yang terdapat pada evaluasi Program Kartu Prakerja, sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Veraningsih, selaku Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas, pada tanggal 19 Juli 2022



**Gambar 4.4 Program Kartu Prakerja tepat sasaran**  
 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima kartu prakerja menyebutkan sebagai berikut:

*Saya sebagai pencari kerja memerlukan tempat kerja yang layak. Walaupun saya telah mendapatkan program kartu prakerja ini saya ingin pemerintah memantau peluang kerja untuk saya dan teman-teman yang lain yang sudah partisipasi dengan kartu prakerja.<sup>85</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber dan data diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya Pencari Kerja setelah mengikuti Program Kartu Prakerja, mereka melampirkan sertifikat untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan, dan berwirausahaan. hanya saja para pencari kerja mengusulkan Pemerintah membuka lapangan kerja untuk para pencari kerja.

## 2. Insentif

Insentif sebagai dimensi yang digunakan untuk melihat bagaimana insentif yang terdapat pada penanggulangan pengangguran melalui Program Kartu Prakerja digunakan dalam mengatasi pengangguran. insentif yang terdapat pada Program Kartu Prakerja ini untuk digunakan sebaik mungkin dalam mencari

<sup>85</sup> Wawancara dengan Anzarullah selaku penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 17 Juli 2022

pekerjaan dan berwirausahaan yang ditunjukkan langsung dana insentif ini kepada masyarakat yang mendapatkan program kartu prakerja.

**Table 4.6**  
**Pemanfaatan insentif pada peserta Program Kartu Prakerja**

Pemanfaatan insentif	
<b>86%</b>	Bahan pangan
<b>71%</b>	Modal usaha
<b>66%</b>	Tagihan listrik/air
<b>56%</b>	Ditabung
<b>59%</b>	Membeli solar/bensin

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh*

Pada tabel 4.5 pemanfaatan insentif pada peserta Program Kartu Prakerja banyak digunakan pada kebutuhan bahan pangan dalam mencari pekerjaan dan 71% untuk modal wirausahaan. Para penerima Program Kartu Prakerja telah menggunakan insentif sesuai kebutuhan pada penerima Program Kartu Prakerja.

a. Bantuan biaya

Bantuan biaya sebagai indikator yang digunakan untuk melihat bentuk penanggulangan pengangguran melalui program kartu prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Bantuan biaya bagian dari Program Kartu Prakerja untuk meringankan biaya mencari pekerjaan dan biaya hidup.

Berdasarkan wawancara Kepala Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas, beliau mengatakan bahwa:

*Besaran bantuan biaya ditentukan oleh kementerian koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perekonomian dan bidang keuangan. Total penyaluran insentif yang telah disalurkan ke peserta penerima program kartu prakerja sebanyak Rp. 324.000.000.000 sesuai data administrasi dari program kartu prakerja. Peserta yang telah mendapatkan insentif menggunakan rekening bank atau rekening E-Wallet (Ovo, LinkAja, Gopay, Dana). Dinas Tenaga*

*Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tidak ada wewenang dalam hal bantuan biaya yang terdapat pada Program Kartu Prakerja.<sup>86</sup>*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas dapat disimpulkan bahwasanya bantuan biaya yang diberikan oleh Program Kartu Prakerja merupakan wewenang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan tujuan adanya bantuan biaya untuk meringankan biaya mencari pekerjaan dan biaya hidup.

b. Jumlah biaya

Jumlah biaya sebagai indikator yang digunakan untuk melihat bentuk penanggulangan pengangguran melalui program kartu prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Jumlah biaya bagian yang diberikan dari angkatan kerja yang sekarang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan.

Berdasarkan wawancara kepala seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas, beliau mengatakan bahwa:

*Program kartu prakerja ini jelas sekali memberi manfaat dari pelatihan dan insentif. insentif merupakan bantuan yang langsung diberikan oleh pemerintah berupa uang, uang yang diberikan itu mempunyai jarak 4 bulan dan setiap bulan diberikan Rp. 600.000 selama 4 kali dan menjadi total Rp.2.400.000 untuk digunakan sebaik mungkin dalam mencari pekerjaan dan berwirausahaan. Insentif itu bukan gaji untuk para pengangguran, melainkan insentif dari pelatihan yang telah diikuti diprogram kartu prakerja untuk digunakan dalam mencari pekerjaan.<sup>87</sup>*

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima kartu prakerja menyebutkan sebagai berikut:

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Veraningsih, selaku Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas, pada tanggal 19 Juli 2022.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Veraningsih, selaku Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas, pada tanggal 19 Juli 2022.

*Saya mendapatkan uang Rp. 600.000 diawal kemudian setiap pelatihan diberikan lagi Rp. 600.00 lagi dan saya mendapatkannya setiap bulan sampai 4 kali, setelah itu diberikan lagi uang 3 kali Rp. 50.000 disuruh saya isi survei. Uang itu saya gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga saya.*<sup>88</sup>

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima kartu prakerja menyebutkan sebagai berikut:

*Alhamdulillah saya mendapatkan uang dari kartu prakerja, saya gunakan uang itu untuk menambahkan bahan jualan saya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak barang yang bisa saya jualkan di warung saya.*<sup>89</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, jumlah biaya yang didapatkan pada Program Kartu Prakerja berupa uang sebanyak 2,55 juta. Uang tersebut bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pada penerima Program Kartu Prakerja. Tujuan pemerintah memberikan jumlah biaya tersebut untuk digunakan dalam mencari pekerjaan atau berwirausahaan.

#### **4.2.2 Peluang dan Tantangan dalam Pelaksanaan Program Kartu Prakerja**

Peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program kartu prakerja merupakan suatu dimensi yang digunakan untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program kartu prakerja.

##### **1. Peluang dan tantangan**

Peluang dan tantangan merupakan suatu dimensi yang digunakan untuk meninjau dalam pelaksanaan program kartu prakerja. peluang itu tersendiri bisa didapatkan pada internal dan eksternal dan begitu pula juga yang terdapat pada tantangan bisa dari internal maupun eksternal.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu putry pelita sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 17 Juli 2022.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu Zainiyah Syarif sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 17 Juli 2022.



a. Peluang dalam Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam dunia kerja dengan menambahkan *skill*. Bahkan dengan Program Kartu Prakerja ini menjadi Program meningkatkan kompetensi dan bantuan sosial berupa uang. Namun, setiap program pastinya mempunyai peluang yang terdapat pada Program Kartu Prakerja. Peluang pada pelaksanaan Program Kartu Prakerja mempunyai faktor dari internal dan faktor eksternal. Ini diutarakan oleh kepala seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas beliau mengatakan bahwa:

*Pada dunia era sekarang semuanya serba gudget dan memanfaatkan gudget dengan menggunakan platform digital yang terdapat pada program kartu prakerja merupakan mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan program kartu prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet dan layanan konten lainnya berbasis internet. Penerima kartu prakerja mendapatkan pendidikan gratis dengan mengikuti pelatihan. Ilmu yang telah didapatkan bisa di implementasikan di dunia kerja.<sup>90</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan kepala seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas, mengatakan:

*Peluang Secara eksternal pada Program Kartu Prakerja yaitu pertama, perekonomian bertambah dan berputar. Kedua, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ketiga, dalam situasi menimpa covid, masyarakat jadi lebih produktif mengembangkan atau menambahkan ilmu dan mempunyai skill.<sup>91</sup>*

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Veraningsih, selaku Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas, pada tanggal 19 Juli 2022.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ibu Veraningsih, selaku Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas, pada tanggal 19 Juli 2022.

b. Tantangan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Dengan adanya peluang tentunya juga ada tantangan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja . Pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini merupakan suatu tantangan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam dunia kerja dengan menambahkan *skill*. Bahkan dengan Program Kartu Prakerja ini menjadi Program meningkatkan kompetensi dan bantuan sosial berupa uang. Namun, setiap program pastinya mempunyai tantangan yang terdapat pada Program Kartu Prakerja. Tantangan pada pelaksanaan Program Kartu Prakerja mempunyai faktor dari internal maupun faktor eksternal.

Berdasarkan wawancara Kepala Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas, beliau mengatakan bahwa:

*Tantangan yang terdapat pada pelaksanaan program kartu prakerja pada pendaftaran, tidak semua kalangan masyarakat yang dikategorikan pengangguran mendapatkan kartu prakerja, tidak semuanya mendapatkan. Ini menggunakan sistem, sistem yang mengatur semuanya dari kita mendaftar sampai selesai. Program kartu prakerja ini bukan programnya kementerian ketenagakerjaan saja tetapi punya menteri koordinator bidang perekonomian yang bekerjasama dengan meteri ketenagakerjaan. Sistem yang saya maksud adalah sitem disaat kita mendaftarkan diri mempunyai kualifikasi yang terdapat pada program kartu prakerja. masyarakat yang mendaftarkan diri wajib Warga Negara Indonesia, berusia dari 18 tahun dan tidak mengikuti pendidikan formal.*<sup>92</sup>

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima Program Kartu Prakerja menyebutkan sebagai berikut:

*Tantangan pada program kartu prakerja ada mendaftar menurut saya tantangannya cuman disaat kita mendaftar, karena saat saya mendaftarkan*

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ibu Veraningsih, selaku Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas, pada tanggal 19 Juli 2022.

*melalui web jadi mungkin banyak yang mendaftar sehingga websitenya eror dan lambat. Kedua, pelatihan dimana pelatihan ini menurut saya tidak efektif karena secara online, seharusnya pemerintah melakukan secara offline. Ketiga tentang dana yang diberikan setelah mengikuti pelatihan, jawa waktunya tidak sesuai jadwal tanggalnya.<sup>93</sup>*

Berdasarkan diatas bahwasanya cara mengatasi tantangan tersebut dengan menghubungi langsung pihak customer service yang ada pada laman Program Kartu Prakerja untuk menanyakan keluhan dalam Program Kartu Prakerja. Partisipasi dari para masyarakat di Aceh terhadap program kartu prakerja, sangat luar biasa. Berdasarkan wawancara kepala seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas, beliau mengatakan bahwa:

*Partisipasi masyarakat cukup bagus, pendaftaran program kartu prakerja pada masyarakat Aceh sebanyak 3.337.711 orang pendaftar dan yang mendapatkan Program Kartu Prakerja 135.707 orang. Dan ini sudah sangat jelas peminat masyarakat menerima bantuan dari pemerintah ini sangat bagus. Semoga dengan peminat sebanyak ini maka skill yang terdapat pada penerima program kartu prakerja diterapkan pada kehidupannya<sup>94</sup>*

## 2. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh merupakan peran pemerintah daerah dalam mendukung Program Kartu Prakerja. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam mendukung Program Kartu Prakerja pada pemerintah daerah sesuai dalam Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program

<sup>93</sup> Wawancara dengan Anzarullah sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 17 Juli 2022.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ibu Veraningsih, selaku Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas, pada tanggal 19 Juli 2022.

Kartu Prakerja dengan melakukan sosialisasi dan fasilitas untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan program kartu prakerja.

a. Sosialisasi

Sosialisasi sebagai indikator yang digunakan untuk melihat pelaksanaan program kartu prakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Sosialisasi Program Kartu Prakerja yaitu kemampuan penyelenggara Program Kartu Prakerja dalam melakukan sosialisasi Program Kartu Prakerja sehingga informasi mengenai pelaksanaan Program Kartu Prakerja dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta Program Kartu Prakerja pada khususnya. Sosialisai bagian dari pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang diberikan langsung oleh pemerintah daerah pada masyarakat yang mempunyai minat dalam Program Kartu Prakerja.

Pada Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada pasal 28 tentang peran pemerintah daerah. Dimana pemerintahan daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan program kartu prakerja dalam bentuk sosialisasi pelaksanaan program kartu prakerja, penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas dimasing-masing daerah, penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri didaerah dan fasilitas pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada program kartu prakerja.

Berdasarkan wawancara kepala seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas, beliau mengatakan bahwa:

*Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh telah melakukan sosialisasi menggunakan media sosial dan televisi Aceh. Dari awal tahun*



*2020 kami telah melakukan sosialisasi sesuai apa yang diperintahkan oleh kementerian ketenagakerjaan. Buka saja website dinaskermobduk disitu ada link resmi mendaftar program kartu prakerja.<sup>95</sup>*

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima Program Kartu Prakerja menyebutkan sebagai berikut:

*Saya tidak mendapatkan apapun dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Saya juga tidak tahu apa-apa tentang dinas itu. Saya dapat bimbingan pendaftaran dari teman saya yang memberikan jasa pendaftaran program kartu prakerja. mungkin Dinas Tenaga Kerja sudah memberikan sosialisasi, mungkin saya saja yang tidak tahu apa-apa kalau Dinas tersebut telah melakukannya<sup>96</sup>.*

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima Program Kartu Prakerja menyebutkan sebagai berikut:

*dinas tersebut saya tidak tahu, mungkin Dinas Tenaga Kerja telah melakukan tugasnya tapi saya tidak tahu apa-apa tentang program ini ada diatur oleh pemerintah daerah yang saya tau ini program pak jokowi.<sup>97</sup>*

Selanjutnya disampaikan oleh salah satu penerima Program Kartu Prakerja tentang cara sosialisasi yang menurut pendapat bisa digunakan:

*Sosialisasi seharusnya dilakukan dinasker di semua daerah kabupaten atau kota yang ada di Aceh. Jadi kami sebagai masyarakat mengetahuinya lebih cepat dan pendampingan Program Kartu Prakerja bisa dilakukan sebaik mungkin. Jika Pendampingan secara langsung terlalu ribet dengan setiap SDM berbeda pemikiran, cukup dengan sosialisasi lewat video bagaimana tata cara menggunakan program tersebut.<sup>98</sup>*

Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwasanya sosialisasi belum terlaksana dengan baik. Sosialisasi yang diberikan belum secara merata, belum sesuai dengan sistem dan kebutuhan masyarakat. Sehingga Program Kartu

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ibu Veraningsih, selaku Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas, pada tanggal 19 Juli 2022.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Ibu Zainiyah Syarif sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 17 Juli 2022.

<sup>97</sup> Wawancara dengan bapak Maulana sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 17 Juli 2022.

<sup>98</sup> Wawancara dengan bapak Anzarullah sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 17 Juli 2022.



Prakerja belum tepat sasaran dan belum efektif sehingga masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Fasilitas

Fasilitas sebagai indikator yang digunakan untuk melihat pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Fasilitas merupakan pendukung dalam melancarkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh kepada masyarakat. Fasilitas yang diberikan berupa sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri dari Program Kartu Prakerja.

Berdasarkan wawancara kepala seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas, beliau mengatakan bahwa:

*Dinas tenaga kerja tidak memberikan fasilitasi berupa pendaftaran maupun bimbingan kepada masyarakat yang ingin mendaftar karena semuanya sudah ada pada akun program kartu prakerja.<sup>99</sup>*

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima Program Kartu Prakerja menyebutkan sebagai berikut:

*Saya tidak mendapatkan fasilitas apapun dari Dinas Tenaga Kerja saya mendaftarkan diri juga mendengar ajakan dari teman-teman saya. Sehingga saya bersama suami mendaftarkan diri tetapi suami saya tidak lulus. Alhamdulillah saya lulus dan saya didaftarkan oleh teman saya dengan persetujuan uang pertama diambil oleh teman saya. Teman saya sebagai jasa untuk mendapatkan program kartu prakerja.<sup>100</sup>*

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima Program Kartu Prakerja menyebutkan sebagai berikut:

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Veraningsih, selaku Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas, pada tanggal 19 Juli 2022.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu Zainiyah Syarif sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 19 Juli 2022.

*saya mendaftarkan program kartu prakerja ini dengan mendaftar sendiri tanpa bantuan dari lain. Pertama saya daftar dari gelombang 2 tidak lulus sampai digelombang 29 saya lulus. Pertama saya putus semangat karena tidak dapat tetapi saya daftar lagi sehingga saya lulus. Seharusnya dinas tenaga kerja memberikan fasilitas kepada kami yang tidak mengerti awal pendaftaran. Saya mencari tahu cara mendaftarkannya di youtube.<sup>101</sup>*

Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwasanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah yang tertuju untuk masyarakat tidak ada. Jadi Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada pasal 28 tentang peran pemerintah daerah. Pemerintahan daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan program kartu prakerja dalam bentuk fasilitas tidak terlaksana.

Pemerintah melakukan Program kartu Prakerja mempunyai keinginan yang tinggi atas program ini untuk masyarakat. Program kartu prakerja ini berguna untuk perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi angkatan kerja serta mengembangkan kewirausahaan. Dengan tujuan yang baik ini harapan/pesan pemerintah daerah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dan Masyarakat Penerima Program Kartu Prakerja untuk Program Kartu Prakerja. Harapan/pesan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh selaku pemerintah daerah untuk Program Kartu Prakerja itu tersendiri yang diutarakan oleh Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas sebagai berikut:

*Harapan bagi penerima Program Kartu Prakerja yaitu penggunaan insentif tersebut dengan baik dan untuk membeli pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan atau skill kita. Skill dan ilmu yang didapat tersebut sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membangun perekonomian. Sedangkan bagi yang tidak menerima jangan pernah*

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Putry Pelita sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 19 Juli 2022.

*berputus asa. Pesan untuk Program kartu Prakerja semoga Program Kartu Prakerja memberi dampak baik untuk masyarakat.<sup>102</sup>*

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima Program Kartu

Prakerja menyebutkan sebagai berikut:

*Pesan untuk Program Kartu Prakerja ke depannya tetap lanjut, penilaian terbuka dan transparansi syarat kelulusan serta para pencari kerja harus terfokus pada peningkatan skill bukan hanya pada insentifnya. Sebaiknya pelatihan ini dilakukan secara langsung (offline), agar lebih efektif dan efisien, memiliki standard-standard pelatihan serta terfokus pada peningkatan kualitasnya.<sup>103</sup>*

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima Program Kartu

Prakerja menyebutkan sebagai berikut:

*Pesan untuk Program Kartu Prakerja, yaitu sebelum program dilaksanakan, perlu dilakukannya sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan masyarakat. Harapan bagi penerima Program Kartu Prakerja, yaitu memanfaatkan pelatihan serta insentif yang diberikan. Sebagai wadah dalam meningkatkan keterampilan serta membuka lapangan pekerjaan baru.<sup>104</sup>*

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima Program Kartu

Prakerja menyebutkan sebagai berikut:

*Pesan untuk Program Kartu Prakerja kedepannya, semoga tetap berjalan seperti ini dan semoga lebih sering lagi membuka gelombang. Bagi penerima program, sebaiknya skill yang sudah didapat, diimplementasikan atau dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Agar dapat membantu masyarakat yang lainnya. Kemudian, dapat membuka peluang usaha agar terbukanya lapangan pekerjaan baru.<sup>105</sup>*

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima Program Kartu

Prakerja menyebutkan sebagai berikut:

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Veraningsih, selaku Kepala Seksi Pemagangan dan Penempatan Produktivitas, pada tanggal 19 Juli 2022.

<sup>103</sup> Wawancara dengan bapak Maulana sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 19 Juli 2022.

<sup>104</sup> Wawancara dengan bapak Anzarullah sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 19 Juli 2022.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu putry pelita sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 19 Juli 2022.

*Pesan kepada program kartu prakerja, semoga Program Kartu Prakerja tidak hanya fokus ke pelatihan tetapi fokus juga kepada lapangan kerja. Kepada masyarakat manfaatkan sebaik mungkin untuk program pemerintah ini karena secara gratis. Dengan adanya Program Kartu Prakerja mampu meningkatkan diri sesuai kebutuhan pekerjaan.<sup>106</sup>*

Berdasarkan harapan/pesan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dan Masyarakat Penerima Program Kartu Prakerja untuk Program Kartu Prakerja dapat disimpulkan bahwasanya harapan/pesan untuk Program Kartu Prakerja ini untuk menjadi lebih baik kedepannya yaitu Insentif digunakan untuk meningkatkan potensi diri, transparansi pada syarat kelulusan, Program Kartu Prakerja dilakukan secara *offline* agar lebih efektif dan efisien, sosialisasi disetiap kabupaten/kota.

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu Zainiyah Syarif sebagai penerima Program Kartu Prakerja, pada tanggal 19 Juli 2022.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan pengangguran melalui Program Kartu dengan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan serta insentif. Intervensi tersebut dapat berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Provinsi Aceh. Kontribusi tersebut relatif dari sisi besarnya karena penurunan angka pengangguran melibatkan banyak faktor. Diantaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat tenaga kerja yang produktifitas dan penciptaan lapangan kerja. Sehingga salah satu akibat penurunan angka pengangguran di Aceh yaitu Program Kartu Prakerja.
2. Peluang dan tantangan pada pelaksanaan program kartu prakerja ini peneliti melihat bahwasanya peluang pada pelaksanaan program kartu prakerja ini mendapatkan skill yang kemudian skill tersebut mampu di implementasikan pada kehidupan sendiri, berwirausahaan, dan mencari pekerjaan. Tantangan pada pelaksanaan program kartu prakerja dengan jaringan yang terdapat banyak keluhan setiap para pengangguran yang ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan pekerjaan. Pelaksanaannya program kartu prakerja belum efektif karena peran daerah belum memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program kartu prakerja. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan memberikan sosialisasi tanpa fasilitas apapun.



## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran terhadap Penanggulangan Pengangguran Melalui Program Kartu Prakerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam bentuk penanggulangan pengangguran dengan Program Kartu Prakerja perlunya bimbingan kepada calon pendaftaran sehingga tidak adalagi oknum yang menawarkan diri untuk memberika jasa dengan maksud memanfaatkan program kartu prakerja, dengan begitu Program Kartu Prakerja ini lebih transparansi.
2. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebaiknya dimaksimalkan dalam memberikan informasi melalui media sosial sehingga sasaran pemerintah tertuju untuk masyarakat yang membutuhkannya. Fasilitas pendaftar sebaiknya diadakan untuk membantu masyarakat yang ingin mengikuti tetapi kurang tau masalah gudget.
3. Harapan untuk Program Kartu Prakerja ke depannya pertama yaitu transparansi syarat kelulusan. Kedua, penilaian terbuka dan transparansi syarat kelulusan. Ketiga, tetap lanjut. Untuk para pencari kerja harus terfokus pada peningkatan skill bukan hanya pada insentifnya saja. Keempat, sebaiknya pelatihan setelah pandemi ini dilakukan secara langsung (offline), agar lebih efektif dan efisien, memiliki standard-standard pelatihan serta terfokus pada peningkatan kualitasnya.

4. Bagi penerima Program Kartu Prakerja yaitu penggunaan insentif tersebut dengan baik dan untuk membeli pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan atau skill. Skill dan ilmu yang didapat tersebut sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membangun perekonomian. Sedangkan bagi yang tidak menerima jangan pernah berputus asa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Ambarwati. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: Al Qalam Media Lestari.
- Aminah, S. Dan Roikan. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Surabaya: Kencana.
- Aryanti, Harnida Gigih dkk, 2015. *Ketenagakerjaan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Arsyad, Lincolin. 2020. *Ekonomi Pembangunan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Azhad, M. Naely dkk. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jember: Cahaya Ilmu.
- BPS Provinsi Aceh. 2021. *Indikator Tenaga Kerja Provinsi Aceh Agustus 2021*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Fadhil, Khotim. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Produktivitas Kerja)*. Jombang: Guepedia.
- Gatiningsih dan Eko Sutrisno. 2017. *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
- Hadi, Abd dkk. 2021. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Harmadi, Sonny Harry B. 2020. *Ekonomi Public*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hasan, Muhammad dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Tengah: Tahta Media Group.
- Haudi. 2021. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Hermawan, Iwan. 2019. *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi*. Kerawang: Hidayatul Quran.

- Kimbal, Rahel Widiawati. 2015. *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kismono, Marsudi W dan Iwan Sofana. 2017. *Menulis Karya Ilmiah*. Bandung: Informatika Bandung.
- Lexy J, Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Majid, Abdul. 2017. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makasar: Penerbit Askara Timur.
- Mujahidin, Akhmad. 2018. *Ekonomi Pembangunan Islam Sebuah Prinsip, Konsep Dan Asas Falsafahnya*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- Muri, Yusuf. A. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Priadana, Sidik dan Denok Sunarsi, 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang Selatan: Pascal Books.
- Rusdiana, Ahmaf. 2021. *Organisasi Lembaga Pendidikan*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD & Pustaka Tresna Bhakti Press Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sudarmanto, Eko dkk. 2021. *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*. Sumaatera Utara: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, Murti dan John Suprihanto. 2014. *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutikno, M. Sobry dan Prosmala Hadisaputra. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Hoslitica.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

Wirawan. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

#### **Jurnal/skripsi:**

Dewi, Nurul Permata. 2021. *Manajemen Pelayanan Public Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Dalam Pengelolaan Program Kartu Prakerja*. Skripsi. Sumatera Utara: UMSU.

HM, Muhdar. 2015. *Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dankemiskinan di Indonesia: Masalah Dan Solusi*", Jurnal Ekonomi, Vol. 11 No. 1.

Lalamentik, Keren Bertine Janice. 2021. *Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pencari Kerja Melalui Program Kartu Prakerja*. Skripsi. Malang: UB.

Nurrahman, Agung. 2020. *Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran di Indonesia*. Jurnal Registratie. Vol. 2. No. 1.

Putri, Asri. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Gobiz*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.

Rasya, M. dan Khairina Tambunan. 2021. *Dampak Covid-19 Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia*. Journal Of Management, Accounting, Economic and Business. Vol.02 No.04.

Sari, Rinda Mayang. 2021. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020*. Skripsi. Sumatera Selatan: UNSRI

#### **Peraturan perundang-undangan:**

PERPRES Nomor 36 Tahun 2020, Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang RI No.13 Tahun 2003. Tentang ketenagakerjaan.

#### **Artikel/website resmi pemerintah:**

BPS Aceh. Tenaga Kerja, diakses <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>, pada tanggal 2 Februari 2022.



Kartu Prakerja diakses <https://www.prakerja.go.id/> pada tanggal 16 Mei 2022.

Karunia, Ade Miranti. 2021. *Program Kartu Prakerja Diklaim Beri Dampak Positif Ke Masyarakat.* Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2021/09/24/135538726/program-kartu-prakerja-diklaim-beri-dampak-positif-ke-masyarakat> diakses pada tanggal 12 Mei 2022.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Form Wawancara Penelitian

Informan: Kepala Seksi Pemagangan Dan Penempatan Produktif

1. Bagaimana pengangguran di Aceh?
2. Apa saja langkah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif di Aceh?
3. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menangani pengangguran di Aceh?
4. Apakah pelatihan yang telah dilaksanakan sudah efektif?
5. Apakah program kartu prakerja bisa meningkatkan kompetensi pada penerima program kartu prakerja?
6. Apakah pelatihan tersebut meningkatkan kompetensi diri?
7. Apakah kompetensi ini bisa digunakan untuk dunia kerja?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kartu prakerja?
9. Bagaimana partisipasi masyarakat setelah mendapatkan program kartu prakerja?
10. Setelah mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikat, menurut anda apakah sertifikat dapat digunakan dalam mencari kerja?
11. Apa saja yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program kartu prakerja?
12. Adakah kendala dalam pelaksanaan program kartu prakerja? Jika ada, apa bentuk dan bagaimana solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

13. Apa peluang pada pelaksanaan program kartu prakerja?
14. Apa tantangan pada proses pelaksanaan program kartu prakerja?
15. Pendampingan dan sosialisasi apa saja yang dilakukan kepada peserta yang akan mengikuti program kartu prakerja dan yang tidak dapat mengikuti program kartu prakerja?
16. Saran anda untuk program kartu prakerja ini?

Informan : Masyarakat Penerima Kartu Prakerja

1. Menurut anda, apa itu program kartu prakerja?
2. Lemabaga pelatihan apa yang anda ambil? Pemerintah/swasta? Dan berikan alasan anda, mengambil pelatihan tersebut?
3. Apakah pelatihan pada program kartu prakerja ini berguna untuk mendapatkan pekerjaan?
4. Apakah pelatihan yang telah dilaksanakan sudah efektif?
5. Apakah program kartu prakerja bisa meningkatkan kompetensi diri anda?
6. Apakah insentif program kartu prakerja ini membantu atau tidak? dan insentif ini sesuai kebutuhan anda?
7. Menurut anda, program kartu prakerja ini membantu atau tidak untuk menanggulangi pengangguran yang ada di Aceh?
8. Bentuk penanggulangan seperti apa seharusnya di Aceh dalam menanggulangi pengangguran?
9. Apa saja yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja?
10. Apakah mengikuti program kartu prakerja ini ada dampingan?

11. Menurut bapak/ibu, mengapa perlu dilakukannya pendampingan kepada penerima Program Kartu Pra-Kerja?
12. Apakah ada kendala dalam proses pendaftaran Program Kartu Prakerja sampai selesai? Jika ada, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
13. Menurut saudara saat sudah mengikuti program ini dan mendapatkan dana, apa tantangan dan peluang pada pelaksanaan program kartu prakerja?
14. Saran anda untuk program kartu prakerja ini?



## Lampiran 2. SK Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 1056/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 06 April 2022

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 PERTAMA : Menunjuk Saudara  
 1. Dr. Sabirin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama  
 2. Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc. Sebagai pembimbing kedua  
 Untuk membimbing skripsi :  
 Nama : Indah Tarina Rizki  
 NIM : 180802027  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Penanggulangan Pengangguran Melalui Program Kartu Pra Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh  
 KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.  
 KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 22 April 2022

Rektor  
 Dekan  
  
 Ernita Dewi

Tembusan :  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;  
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;  
 4. Yang bersangkutan.



### Lampiran 3. Penelitian Ilmiah Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1291/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INDAH TARINA RIZKI NUZUL FITRI / 180802027**  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Jl. Shalihin komp BTN No 28, Lamglumpang, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penanggulangan Pengangguran Melalui Program Kartu Prakerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

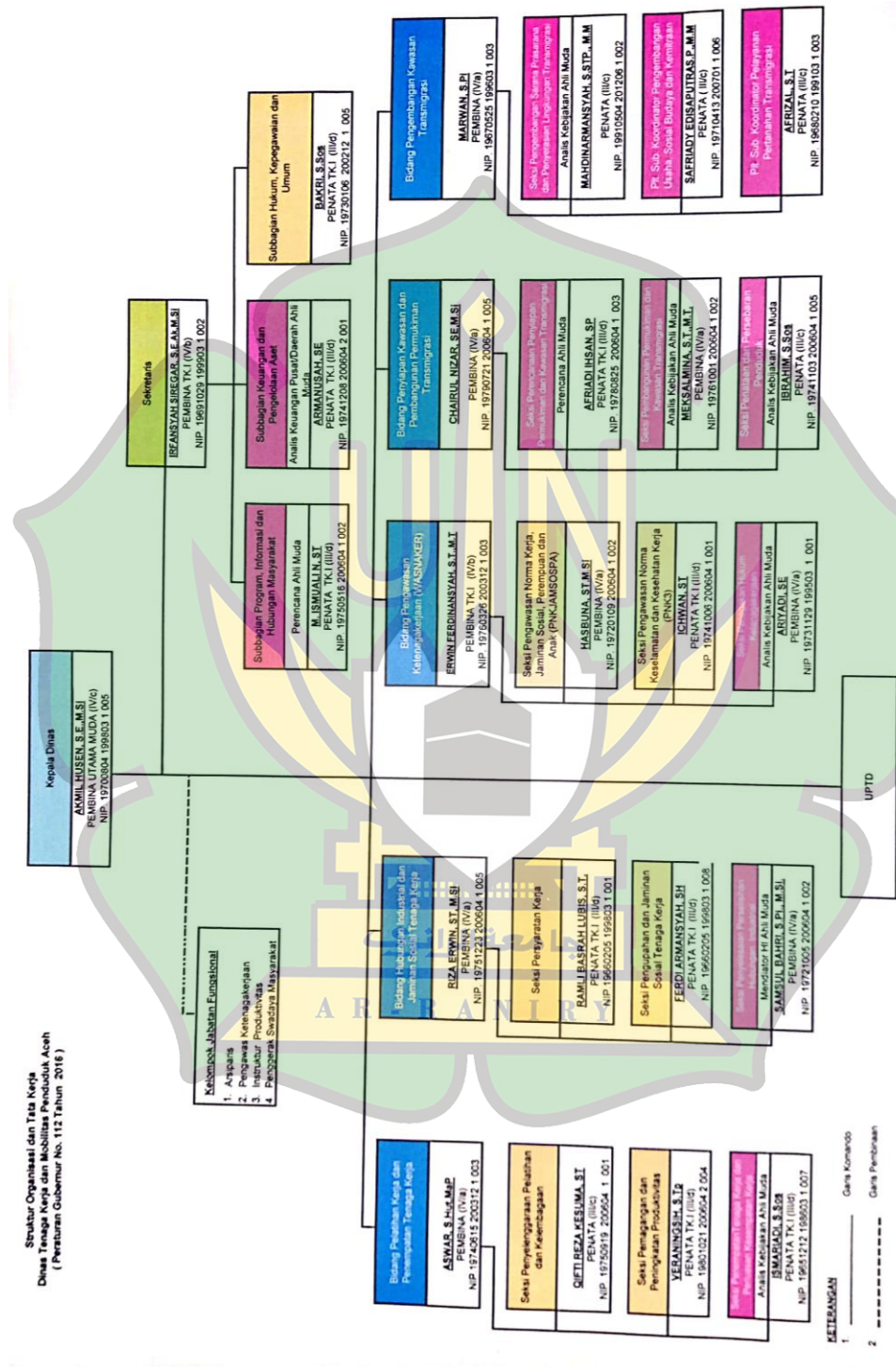
Banda Aceh, 02 Juni 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 Desember  
2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

### Lampiran 4. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh



**Lampiran 5. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020**



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 36 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA  
MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja;
  - b. bahwa untuk pengembangan kompetensi angkatan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan Program Kartu Prakerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;

**Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.

BAB I . . .

## Lampiran 6. Dokumentasi



Observasi awal bersama Kepala seksi pemangangan dan produktivitas



Kepala seksi pemangangan dan produktivitas





Masyarakat penerima program kartu prakerja



Masyarakat penerima program kartu prakerja





Masyarakat penerima program kartu prakerja



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Indah Tarina Rizki Nuzul Fitri  
 Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Januari 2000  
 Nomor Handphone : 085320599254  
 Alamat : Lamglumpang, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh  
 Email : [180802027@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180802027@student.ar-raniry.ac.id)

### Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN BAMBI 1  
 Sekolah Menengah Pertama : MTSN SIGLI  
 Sekolah Menengah Atas : SMK SMTI BANDA ACEH

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B | 2020 | Ma'had Al-Jamiah  
 TOEFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 TOAFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Komputer : A | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Magang : 96 | 2021 | Dinas Pertanian Aceh

Banda Aceh, 10 November 2022

**INDAH TARINA RIZKI NUZUL FITRI**  
**NIM.180802027**